



**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PERUM BULOG**

Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	1 (Satu)
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Tertutup – Terbuka
Dengan	:	Menteri Pertanian RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Hari, Tanggal	:	Senin, 9 September 2019
Waktu	:	11.00 WIB s/d Selesai
Acara	:	1. Pembahasan RKA K/L Tahun 2020; 2. Pembahasan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	:	Edhy Prabowo, M.M., MBA.
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	:	26 dari 47 anggota
Hadir Mitra Kerja	:	Menteri Pertanian RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

ANGGOTA KOMISI IV DPR-RI:

1. EDHY PRABOWO, M.M.,MBA.
2. DRS. H. ROEM KONO
3. DR. MICHAEL WATTIMENA, SE., M.M.
4. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
5. DANIEL JOHAN
6. SUDIN
7. Drs. I MADE URIP, M.Si.
8. Ir. EFFENDI SIANIPAR
9. RIDWAN ANDI WITTIRI
10. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.AB.
11. A.A BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
12. Ir. H. EDDY KUNTADI
13. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
14. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, SP.
15. DRS. H. UMAR ARSAL
16. DR Drs. YUS SUDARSO, SH., M.M.
17. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos
18. M. IRWAN ZULFIKAR, MBA.
19. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S,Ag.
20. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP., M.M.
21. Dr. HERMANTO, S.E., M.M
22. Hj. KASRIAH
23. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
24. Drs. HASANUDDIN, AS, M.Si.
25. Drs. FADHOLI
26. SULAEMAN L. HAMZAH

ANGGOTA YANG IJIN :

1. Ir. MINDO SIANIPAR
2. ONO SURONO, S.T.
3. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, SS.
4. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., MM
5. Ir. TAGORE ABUBAKAR
6. DJENRI ALTING KENTJEN, S.H., M.H.
7. H. M. SALIM FAKHRY, SE., M.M.
8. H. AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si.
9. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Si.
10. IR. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
11. Drs. WENNY WAROUW
12. Ir. ENDRO HERMONO, MBA.
13. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
14. Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
15. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.

16. Drs. IBNU MULTAZAM
17. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
18. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
19. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
20. Drs. MUCHTAR LUTHFI A.MUTTY, M.Si.
21. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., MBA.):

**Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om swastiastu**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Kepala Badan Restorasi Gambut beserta jajarannya,
Yang terhormat Saudari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat para Direktur Mitra Kerja Komisi IV DPR RI ada Perum Bulog, PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaan, PT. Berdikasi, PT. Pertani, PT. Sangyang Sri, Perum Peru Tani, PT. Inu Tani 1 s/d 5, Perum Perindo, PT. Perinus, PT. Garam, serta hadirin yang kami hormati.**

Mengawali Rapat hari ini marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Kuasa , karena berkat Rahmat dan Hidayahnya kita dapat mengadakan rapat dalam keadaan sehat walafiat guna menjalankan salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi anggaran. Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 23 Juli 2019 dan Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/113585/DPRRI/VII/2019 perihal, Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Pada hari ini Senin, 09 September 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan, serta Menteri Kelautan & Perikanan membahas RKAKL tahun 2020. Pembahasan usulan program-program yang akan didanain oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI dan lain-lain.

Menurut laporan dari Sekretariat DPR RI saat ini Rapat Kerja Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditanda tangani oleh 15 dari 47 Anggota dan 9 Fraksi dari 10 Fraksi

sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 246 dan Pasal 251 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat ini belum kita buka karena belum memenuhi korum, namun kita bisa scors tergantung usulan kita semua, saya tawarkan usulannya adalah 5 menit saja baru nanti kita menunggu Anggota sehingga setelah itu bisa kita buka rapat ini sesuai dengan ketentuan yang ada.

Apakah bisa kita lanjutkan?

ANGGOTA:

Jangan 5 menit Ketua, saya sekalian laporin Anggota saya dulu, kasih waktu agak 10 lah sekitar 15 menit.

KETUA RAPAT:

Bai 10 menit,
10 menit, ada usulan 10 menit?

ANGGOTA:

Ketua mungkin dicek juga Anggota Komisi IV, karena sekarang ini lagi banyak ikut LEMHANAS Ketua, apakah masih diizinkan apa tidak Ketua?

KETUA RAPAT:

Baik, Sambil menunggu dan mengecek saya pikir kita sepakati rapat kita buka, kemudian kita scors 10 menit setuju?

Dengan mengucapkan *bismillahirrohmaanirrohiem* rapat kami buka dan rapat ini terbuka untuk umum, sekaligus sambil menunggu keabsaan rapat ini kita akan scors 10 menit.

(Rapat dibuka dan di scors pukul: 11.00 WIB)

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Ibu sekalian bisa kita cabut scorsnya.

(Skorsing Rapat dicabut Pukul 11.10)

Sesuai undangan rapat kerja hari ini seharusnya dimulai pukul 10 namun karena beberapa hal baru bisa kita mulai pukul 11:10, dan diharapkan bisa selesai pukul 12, tapi saya yakin kita akan molor. Mudah-mudahan tidak begitu lama, sebelum makan siang bisa kita selesaikan. Mungkin kita sepakati, kita mulai rapat sampai pukul 13:30, kalau tidak kita perpanjang. Kalau kita rencanakan lama selesainya cepat, tidak masalah. Oke kita sepakati rapat pukul sekarang dibuka sekarang sampai pukul 13:00, manakala masih perlu diperpanjang kita akan perpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan agenda yang;

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Pemerintah mengenai RKA K/L tahun 2020, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR dan lain-lain,
3. Tanggapan Komisi IV DPR RI,
4. Jawaban atas tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI,
5. Kesimpulan,
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Bapak Ibu yang kami hormati,

Rapat Kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan mengenai RUU tentang APBN tahun anggaran 2020.

Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024, berdasarkan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2020 kebijakan RAPBN tahun 2020 diformulasikan kedalam bentuk program-program prioritas pembangunan yaitu;

1. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Penguatan Program Perlindungan Sosial
3. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
4. Penguatan Kualitas Desentralisasi Fiskal
5. Reformasi Birokrasi

Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh serta meminta agar kebijakan dan rencana kerja disusun secara tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan Pemerintah dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel. Mengingat melalui APBN tahun 2020 Pemerintah akan mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi daya saing dan nilai tambah diantaranya melalui inovasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang semakin merata diseluruh pelosok Indonesia, serta tata kelola Birokrasi yang melayani rakyat. Tentunya target program prioritas pembangunan diatas tidaklah mudah untuk dicapai tanpa adanya dukungan anggaran penuh dari Komisi IV DPR RI.

Perlu kami informasikan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan & Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor S557.1/MK.02/2019 dan B432/M.PPN/D.8/AU.01.01/07 2019 tanggal 22 Juli 2019 pagu anggaran Kementerian mitra Komisi IV DPR RI tahun anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Kementerian Pertanian sebesar Rp.21.55.309.526.000.
2. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan sebesar Rp.9.319.325.816.000.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.6.472.753.539.000.

Disamping itu Kementerian Pertanian mengalokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2020 sebesar Rp.26.627.384.695.943 dan DAK tahun 2020 sebesar Rp.1.500.000.000.000 yang digunakan untuk membangun asas pemerataan pembangunan dan pertumbuhan berkualitas melalui pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan dasar, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Adapun DAK tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.1.5.200.000.000 yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasana Kelautan dan Perikanan.

Pada kesempatan hari ini Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, keterpaduan, dan penyederhanaan terhadap program-program yang disusun agar tidak tumpang tindih, serta pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut pada rapat hari ini Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari saudara dan saudari, saudara Menteri Pertanian khususnya terkait dengan kurang bayar subsidi pupuk tahun anggaran 2015 – 2018, saudari Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan, dan saudari Menteri Kelautan & Perikanan.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan.

Selanjutnya kepada saudara Menteri Pertanian, saudari Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan, saudari Menteri Kelautan & Perikanan kami persilakan untuk menyampaikan penjelasannya.

Saya usulkan dimulai dulu dari Menteri yang paling senior.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Pak Ketua, interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya nanti saya kasih kesempatan Pak

Saya usulkan penyampaian nanti dari Menteri Pertanian, baru Menteri LHK, baru Menteri KKP.

Bisa disetujui?

Kami persilakan sebelum dimulai ada interupsi dari Banggar.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati, Ibu Menteri dan Pak Menteri Pertanian, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.

Pertama Pak Ketua, saya cuman menyampaikan interupsi agar rapat RDP ya dengan ESELON I dengan pihak Kementerian ini kita berharap Menteri sudah mendapatkan laporan dari rapat itu, karena rapat kita kemarin itu cukup dinamis Pak Ketua. Jadi kita berharap bukan hanya sekedar mendengarkan masukan, pertanyaan atau sangkaan dari DPR tapi apa tindak lanjutnya begitu. Oleh karena itu saya berharap Menteri Pertanian, Menteri KKP dan Kehutanan sudah mendapatkan laporan, dan ada tindak lanjut kedepannya begitu, itu yang paling penting sebenarnya.

Yang kedua karena masih ada rapat nanti setelah ini dengan RDP dengan ESELON I, kita berharap nanti jawabannya nanti juga bisa dilengkapi nantinya, karena teman-teman kita ini Menteri dan Pak Menteri banyak tidak melanjutkan lagi, apa

pengabdian. Sehingga perlu juga hak-haknya mereka ini, janji-janjinya mereka ini terhadap konsekuensi ini bisa dipenuhi, itu sebenarnya intinya disitu.

Jadi saya kira itu saja Pak Ketua dan saya sepakat tadi bahwa rapat kita mungkin tidak terlalu lama. Tapi intinya bagaimana tindak lanjutnya sebenarnya, untuk apa kita bicara panjang-panjang tapi tidak ada tindak lanjut, iya kan begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya intinya rapatnya dengan ESELON I kita kemari sudah mengadakan pendalaman baru sebagian, karena masih ada pendalaman lanjutan. Kan setelah ini, inikan baru menyampaikan pagu indikatif masing-masing Kementerian. Jadi detailnya nanti permasalahan yang disampaikan oleh Pak Andi Akmal tadi adalah menjadi perhatian juga, saya yakin sudah 4 tahun komunikasi kita, mudah-mudahan 4 tahun ini juga terus tetap terjalin baik.

Diterima masukannya saya pikir, nanti menjadi tindak lanjut.

Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian.

FP-DEMOKRAT / WAKIL KETUA (MICHAEL WATTIMENA, S.E.):

Pak Ketua satu lagi Pak Ketua boleh?

Terima kasih Pak Ketua.

Mungkin sebelum Ibu Menteri Perikanan dan Kelautan menyampaikan materi, kami mohon juga dijelaskan sedikit Bu terkait dengan utusan staf Ibu ke Maluku, dan kira-kira apa yang menjadi tuntutan dari pada masyarakat Maluku, khususnya Pemerintah. Karena pemberitaan yang kita dengar dan kita baca, Gubernur Maluku menyatakan perang, tetapi semestinya, eh bukan semestinya, kalau perang semestinya itu sudah dinyatakan oleh Ibu melalui sikap menenggelamkan. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, tapi dengan sikap yang sangat sigap dan tegas Ibu mengirimkan utusan Ibu bertemu dengan Gubernur Maluku. Padahal kita tau bahwa Maluku adalah daerah kepulauan yang terbesar kedua setelah kepri, dari tujuh kepulauan daerah kepulauan yang ada di Indonesia. Kalau memang ada diskresi nanti Ibu lakukan kepada Maluku maka tidak terlepas juga kepada 6 daerah kepulauan lainnya. Kepri itu 5% aja adalah daratan, sisanya adalah kepulauan. Maluku 7,6 itu adalah lautan, sisanya adalah

daratan dan ada 5 daerah kepulauan lainnya. Mungkin melalui kesempatan yang berbahagia ini Ibu juga bisa menjelaskan apa yang menjadi permintaan dari pada Pemerintah Daerah Maluku bersama-sama dengan masyarakat yang ada disana melalui utusan yang Ibu kirimkan.

Itu Pak Ketua supaya Publik juga tau dan apa yang menjadi sikap Ibu mengakhiri masa jabatan yang pertama untuk melanjutkan lagi pada masa jabatan yang kedua nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya nanti biar dijawab langsung pada saat penyampaian materi dari KKP.
Kami persilakan dari Menteri Pertanian.

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, MP.):

Bismillahirrohmaanirrohiem

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Yang terhormat Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan,
Hadirin sekalian yang kami hormati.**

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Mengawali rapat kerja pada hari ini perkenankan saya berserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini, dengan agenda pembahasan RKKL tahun anggaran 2020, yang kedua pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, tiga dan lain-lain.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda pertama kami akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020, RK Kementerian Pertanian tahun 2020 mengacu kepada tema rencana kerja Pemerintah yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia untuk

pertumbuhan yang berkualitas. Yang terdiri dari 5 prioritas Nasional pengembangan sector Pertanian tahun 2020 akan terkait dengan prioritas Nasional ke-3 yang nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja pada prioritas nasional ke-4 yaitu ketahanan pangan, air, enersi, dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan prioritas nasional tahun 2020 Kementerian Pertanian akan tetap focus pada penuhi kecukupan pangan melalui upaya peningkatan produksi pangan strategis seperti, padi yang pada tahun 2020 ditargetkan bisa mencapai 85,85 juta ton, jagung ditargetkan 33,96 juta ton, dan kedelai 1,12 juta ton. Begitu pula produksi pangan lainnya seperti bawang merah pada tahun 2020 ditargetkan 1,53 juta ton, dan cabai 2,5 juta ton. Komoditas ternak khususnya daging sapi, kerbau ditargetkan sebesar 0,45 juta ton. Dan tidak kalah pentingnya juga peningkatan produksi dari subsector perkebunan utama komoditas tebu target 2,18 juta ton, serta komoditas lainnya yaitu kelapa, bakau, dan kopi. Dalam rangka mewujudkan target produksi pangan tersebut Kementerian Pertanian selain akan melanjutkan kegiatan utama yang telah diritih tahun sebelumnya seperti, bekerja serasi, pengembangan komoditas strategis upsus siwap, modernisasi pertanian, dan penyediaan lain melalui rehabilitasi irigrasi imprastruktur embung, dan bangunan air lainnya. Kementerian Pertanian memprioritaskan peningkatan pendidikan dan pelatihan pokasi yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM pertanian, salah satu kegiatan unggulan yang melibatkan SDM adalah gerakan petani milenial berorientasi ekspot. Untuk pelaksanaan kegiatan utama dan pencapaian target produksi diatas Kementerian Pertanian mendapatkan pagu anggaran tahun 2020 sebesar 21,05 triliun. Besaran pagu anggaran tahun 2020 tersebut lebih rendah 0,66 triliun dibanding alokasi anggaran tahun 2019 sebesar 21,71 triliun. Selanjutnya pagu anggaran 2020 dialokasikan pada 11 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Selanjutnya sebagai agenda ke-2 izinkan kami menyampaikan program pertanian yang akan di danai dengan DAK. Kementerian Pertanian tahun 2020 juga telah menerima pagu anggaran DAK fisik penugasan bidang Kementerian Pertanian sebesar 1,5 triliun dari besaran pagu DAK tersebut sebesar 384 diaolaksikan di Provinsi, sedangkan sisanya 1,1 triliun dialokasikan di Kabupaten dan Kota. Ditingkat Provinsi DAK digunakan untuk pembangunan rehabilitasi UPTD balai pembenihan pembibitan proteksi serta sarana dan prasarana pendukungnya, sementara ditingkat Kabupaten Kota DAK digunakan untuk bangunan sumber-sumber air serta pembanguna rehabilitas BPP dan sarana pendukung lainnya.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda yang ke-3 hal yang perlu kami laporkan bahwa alokasi anggaran subsidi pupuk 2020, anggaran subsidi pupuk 2020 direncanakan 26,63 triliun yang diperuntukan subsidi urea, asp36, zanpk, dan organic.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja hari ini. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih ringkih, saya mohon perkenankan Pimpinan agar Pejabat Eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan.

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., MBA.):

Selanjutnya kami persilakan dari Menteri KLHK.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih

**Ketua yang kami hormati,
Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Menteri Pertanian, dan Ibu Menteri KKP, serta Bapak Ibu yang hadir.**

Pertama kami juga menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT dan ucapan terima kasih kepada **yang terhormat Pimpinan dan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI** atas undangan rapat kerja ini dan atas dukungan bimbingan dan carits Komisi IV DPR RI kepada LHK selama ini.

Saya juga ingin melaporkan sebagaimana tadi catatan **yang terhormat Ketua** bahwa kami telah mendapatkan laporan dari RDP dari Pak Sekjen dan ESELON I dan sudah dilaporkan, dan ditegaskan komitmen dan jadwal-jadwal untuk penyelesaian 2019.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Izinkan kami melaporkan RKA K/L Kementerian LHK untuk tahun 2020. Dengan arah pembangunan sebagaimana mohon periksa pada screen 5 yaitu untuk pengetasan kemiskinan, penguatan ekonomi nasional, dan investasi dan ekspor, infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan dan pendidikan nasional avokasional, serta penguatan program yang menyerap tenaga kerja.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Ibu, dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Pada RKP 2020 dengan tema peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas dari 5 prioritas nasional, sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh Pak Mentan. Untuk Kementerian LHK kami mendapatkan mandat nasional yaitu, pada prioritas pertama berkaitan dengan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yaitu pada bagian pengentasan kemiskinan. Dan selanjutnya juga pada prioritas nasional ketiga yaitu mandate nasional yang kedua yang diberikan kepada LHK berkenaan dengan nilai tambah sektorlir, industrialisasi dan kesempatan kerja yaitu melalui peningkatan nilai tambah dan investasi serta peningkatan produktifitas tenaga kerja dan penyiapan perluasan kesempatan kerja.

Demikian pula mandate nasional diberikan kepada KLHK pada prioritas yang keempat yaitu berkenaan dengan ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup, menyangkut peningkatan kuantitas, kualitas, dan akses stabilitas air pada prioritas nasional yang kedua, kemudian peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Bapak Pimpinan dan Ibu Anggota yang kami hormati.

Saya mohon izin dan mohon periksa pada halaman 7 dan halaman 8, bahwa pada mandate nasional prioritas pertama berkenaan dengan pengentasan kemiskinan dan reforma agraria atau perhutanan social menyangkut lima program prioritas yaitu, penataan, penguasaan dan pemilikan tora, termasuk pelepasan kawasan hutan pada saat ini sudah dilepaskan untuk toren dari 4,17 yaitu pencadangan seluas 4,1 juta hektar yang telah diselesaikan pencadangan dan verifikasi 2,6 juta. Pada tanggal 5 kemarin sudah diserahkan untuk pertama kalinya se-Kalimantan 133.000 hektar tanah dari hutan itu menjadi sertifikat. Kemudian juga berkaitan dengan penyiapan pra kondisi masyarakat pendesaan dan kawasan berkenaan dengan hutan social, ya yang pada saat ini telah diselesaikan dan dialokasikan hutan social 3,32 juta hektar Ketua, dan Bapak Pimpinan, dan Bapak dan Ibu Anggota, untuk 737.780 KK. Jadi mohon periksa pada halaman 8 termasuk dukungan untuk peningkatan kapasitas institusi, pengembangan usaha perhutanan social maupun pengelolaan secara kolaboratif.

Pada kegiatan prioritas nasional yang ketiga mohon periksa pada halaman 9 & 10 yaitu, berkenaan dengan peningkatan industry berbasis pertanian yang terintergrasi hulu dan hilir, yakni dalam kaitan dengan pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari dan juga upaya untuk silfikator, dan peningkatan nilai ekspor yaitu dengan penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan tenaga teknis menengah kehutanan.

Selanjutnya pada program prioritas nasional yang keempat berkaitan dengan ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup, mohon periksa pada halaman 11 dan 12. Berkenaan dengan program prioritas peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesstabilitas air menyangkut penataan kawasan hutan, pemeliharaan, pemulihan dan konserfasi sumber daya air dan ekosistem, serta program nasional citarum. Dan peningkatan kualitas lingkungan hidup berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, penanggulangan, pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, pemulihan, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang mohon periksan rinciannya pada halaman 12.

Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati.

Secara nasional perioritas nasional yang dimandatkan kepada KLHK yaitu pada halaman 14 mohon periksa bagi 11 program dengan nilai 4,9 triliun dari pagu yang ada berarti kira-kira 53% dari dana Kementerian LHK diberikan mandate untuk perioritas nasional sebanyak 53%.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormari.

Pada akhirnya kami mohon perkenan **yang terhormat Pimpinan, dan Ibu dan Bapak Anggota** untuk mohon persetujuan bagi pagu Kementerian LHK untuk tahun 2020 pada halaman 16 yaitu;

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dengan pagu Rp.592.759.666.000.
- b. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp.86.966.609.000.
- c. Program pengolahan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan dengan pagu Rp.3.754.834.000.
- d. Program pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung senilai Rp.2.799.916.214.000.
- e. Program konservasi sumber daya alam dan ekosistem dengan pagu Rp.2.49.226.996.000.
- f. Program planologi dan tata lingkungan dengan pagu Rp.480.427.494.000.

- g. Program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp.393.833.245.000.
- h. Program peningkatan penyuluhan dan pengembangan ESDM dengan pagu Rp.341.386.089.000.
- i. Program perhutanan social dan kemitraan lingkungan dengan pagu Rp.458.679.200.000.
- j. Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan pagu Rp.468.790.771.000.
- k. Program pengendalian perubahan iklim dengan pagu Rp.313.272.831.000.
- l. Program pengelolaan sampah, limbah dan B3 dengan pagu Rp.361.844.139.000.
- m. Dan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pagu Rp.357.472.233.000.
- n. Dan total untuk program-program LHK senilai Rp.9.6.330.291.000, serta melekat pada KLHK yaitu program badan restorasi gambut senilai Rp.312.995.525.000 dan total KLHK dan BRG senilai Rp.9.319.325.816.000, juga hal-hal yang tercantum di dalam dokumen yang kami laporkan.

Kami juga ingin melaporkan tentang DAK untuk sub bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pagu DAK untuk LHK senilai Rp.612.000.000.000, dan untuk sector kehutanan sebesar Rp.300.2.000.000.000, bagi 33 Dinas Kehutanan Provinsi dan DAK untuk lingkungan sebesar Rp.312.000.000.000 bagi 139 Kabupaten Kota dengan 12 Provinsi yaitu masing-masing untuk lingkungan bagi penguatan early warning system untuk bencana lingkungan seperti online monitoring system kualitas air, pengadaan alat uji kualitas air dan merkuri, pembangunan dan early polity monitoring system untuk kualitas udara. juga untuk pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana pendukungannya termasuk pembangunan pusat daur ulang sampah, bank sampah, alat angkut dan lain-lain. Dan untuk kehutanan yaitu mencakup program pembangunan sarana dan prasarana operasional lisasi ikph, taman hutan raya, serta akses kelola hutan social, dan untuk rehabilitisasi hutan dan lahan.

Pimpinan dan Ibu, dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Akhirnya kami mohon perkenan persetujuan dan dukungan **yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat** atas PRKAKL Kementerian LHK untuk tahun 2020.

Demikian laporan kami kurang lebih mohon maaf, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Menteri,
Dari BRG mungkin ada tambahan engga, Ibu Menteri perlu ada penambahan engga?

Kami persilakan dari Menteri KKP.

MENTERI KKP (Dr. SUSI PUDJIASTUTI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, juga Bapak Amran, Bapak Menteri Pertanian.**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah mencurahkan rahmat dan karunainya pada kita semua, sehingga pada hari ini semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Membahas pendalaman rencana kerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020 dan usulan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus bidang Kelautan dan Perikanan.

Rencana kerja anggaran KKP tahun 2020,

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Sasaran utama pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2020 adalah pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi Perikanan sebesar 26,43 juta ton. Gerakan nasional 3 juta ton nilai tukar nelayan naik menjadi 115 tingkat konsumsi ikan menjadi 56,39 kg/kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar 5,98 miliar, dan jumlah kawasan konservasi perairan seluas 22,27 juta hektar. Berdasarkan Surat bersama Menkeu nomor 557.1/MK02 tahun 2019, dan Menteri Perencanaan Pembangunan BAPPENAS nomor B432/MPPN/D8/KU0101/07557.1/MK.02/2019 tanggal 22 Juli perihal pagu anggaran Kementerian Lembaga dan Penyelesaian RKAKL tahun 2020, serta berdasarkan kesimpulan rapat DPR 18 Juni 2019. KKP memperoleh pagu anggaran tahun 2020 sebesar 6,47 triliun. Rancangan usulan pagu anggaran KKP 2020 berdasarkan unit

ESELON I yakni PJPT Dirjen Perikanan Tangkap sebesar 726,55 Miliar, Dirjen Perikanan Budidaya 739,57 Miliar, Dirjen Penguatan Daya Saing sebesar 36602 Miliar, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 507,85 Miliar, Dirjen Pengawasan SDKP 106 Triliun, Badan Riset SDM KP 1,87 Triliun, Karantina Ikan sebesar 601,80 Miliar, Inspektorat Jenderal 77,27 Miliar, Sekjen sebesar 523,62 Miliar. Selanjutnya pagu anggaran akan digunakan untuk rancangan kegiatan prioritas antara lain, program perikanan tangkap, untuk bantuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, rehab pelabuhan nelayan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan, implementasi integrasi sistem perizinan, pusat daerah perikanan tangkap, fasilitas kredit perikanan tangkap, diversifikasi usaha keluarga nelayan dan juga untuk kelompok perempuan, sertifikasi awak kapal, penerapan perjanjian kerja laut, penambahan sambandar perikanan, obser perkapal perikanan, penerapan elok, partisipasi RFMO, operasionalisasi lembaga pengelolaan sumber daya ikan di WPPMRI, perluasan dan peningkatan pelabuhan perikanan, serta operasional SKPP tunas kaum kali Marauke dan Sebate.

Program perikanan budidaya untuk bantuan sarana dan prasarana percontohan budidaya meliputi minyak padi bioflog eksfaktor, pengolahan irigrasi tambak kolam, kebun bibit rumput laut, kultur jaringan pakan mandiri, percontohan budidaya pakan alami dan juga untuk ikan hias benih calon iduk, bibit rumput laut, benih ikan dan calon iduk, pembangunan rehasaplas, pembenihan rakyat, skala rumah tangga, pengujian tampel kesehatan ikan, lingkungan pengajuan reproduksi perikanan, sertifikasi ekspor, percontohan pengolahan skalter kawasan budidaya, asuransi budidaya, serta operasional SKPT di Rotendao, Sumbat Timur dan Sabang.

Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk antara lain sarana pengolahan, kedaraan pendingin cast plezier ice black nosing, pembakaran dan rehab gudang beku, promosi gemar makan ikan, promosi pasar ikan, serta kuliner bimbingan pengolahan percontohan dan pembangunan pasar ikan bersih, layanan sertifikasi, layanan kelayakan pengelolaan, pembangunan rehab upi skala mikro kecil maupun bantuan perlengkapan untuk para pedagang ikan, marine and fisheries bisnis forum, serta lanjutat PT.dibiya dan mimika.

Program pengelolaan ruang laut diperuntukan antara lain pembangunan sarana pesisir dan pulau-pulau kecil berupa dermaga apung, sarana ekonomi produktif, prasertifikasi pulau terluar, pembangunan restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir, he break engineering, gerakan cinta laut dan penanganan sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil, pengembangan pesisir terpadu, penanaman vegetasi pantai, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, pemetaan pembentukan kemasyarakatan pembentukan adat, pengembangan usaha garam rakyat, sarpas wisata bahari, dan BMKT (benda muatan kapal tenggelam), pencadangan kawasan konservasi perairan dan jenis ikan, bantuan kelompok konservasi, rencana

zona zksknkst perairan wilayah laut provinsi, serta operasional skpt di Marakau Taita laut, Mentawai dan Moa.

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperuntukan antara lain operasional kapal pengawas, pesawat patroli, pengawasan distraksi fishing, kawasan konservasi, kepatuhan kapal perikanan, sistim pemantauan SPKT, operasional speedboat, raderboat, operasional satgas, perawatan kapal pengawas, pembangun kapal pengawas, pembangunan speedboat pengawas, bangunan pos pengawasan, serta operasional pembinaan pokmaswas.

Program riset dan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pendidikan apokasi, beasiswa aparatur, pelatihan masyarakat, aparatur sertifikasi kompetensi, penyuluhan dan operasional tenaga penyuluh perikanan, fasilitasi ilegalitas usaha bagi pelaku usaha, penerapan iptek riset dan stemand, kajian stok sumber daya ikan dan perairan umum daratan, kajian rekomendasi kelautan perikanan, riset model pembangunan kelautan perikanan, riset alat mesin, riset ikan unggul, vaksin progiotik, penyediaan data informasi riset Kelautan dan Perikanan, pembangunan sarpres pendidikan, sarana pelatihan penyuluhan riset dan riset data satelit radar.

Program Karantina Ikan pengendalian mutu dan keamanan dan hasil perikanan, penanganan kasus pelanggaran perkarangtinaan dan keamanan hayati ikan, operasional pengawasan ekspor, inmpor dan domestic, pengawasan mutu hasil perikanan domestic, operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan, pengujian mutu laboratorium acauan hama penyakit hasil perikanan, juga akreditasi lembaga penguji, inpeksi pelayanan pencegahan, pengawasan ekspot impor jenis ikan yang dilarang maupun dilindungi dan dibatasi, pengendalian pengawasan spesies ikan atau spesies aquatic berbahaya yang dilindungi dan sarana prasarana pengawasan karantina mutu hasil perikanan.

Program pengawasan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP. Untuk pengawasan akuntabilitas kegiatan prioritas tujuan tertentu investigasi penerapan budidaya intergritas, sinergi pengawasan dengan pihak eksternal, perencanaan program kerja, pengawasan evaluasi kinerja, pengawasan pengembangan peningkatan ESDM pengawasan, analisis tidak lanjut data pengawasan dan pengelolaan keuangan dan sarana pengawasan.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, untuk penyiapan produk hukum dan penataan organisasi, pengelolaan ESDM aparatur, pengelolaan keuangan, perencanaan penganggaran kinerja, dan kerja sama antar lembaga, pengelolaan administrasi dan PBJ, pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri, pengelolaan data statistic informasi serta operasional BLLPMUKP.

Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK bidang kelautan dan perikanan.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Pagu indikatif DAK fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 sebesar 1,005 triliun terdiri dari DAK Provinsi untuk 33 Provinsi, penerima sebesar 328,1 miliar, dan DAK Kabupaten Kota dan 444 Kabupaten Kota, penerima sebesar 677,1 miliar.

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diperuntukkan untuk pembangunan rehabilitasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan UPTD Provinsi, pembangunan rehabilitasi unit pembenihan UPTD provinsi dan percontohan budidaya laut, pembangunan rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, prasarana pulau-pulau kecil, pembangunan rehabilitasi prasarana di kelautan pulau-pulau kecil, pengadaan sarpras pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, pengadaan Tambak garam, rehabilitasi sarpras pengolahan hasil perikanan, pembangunan rehabilitasi sikap pokok unit pembenihan, pengadaan sarpras pemberdayaan usaha nelayan kecil, pengadaan sarpras pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil.

Bapak Ketua, Wakil Ketua para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Dengan pentingnya peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal program kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020, dengan ini kami mengusulkan penambahan Pagu anggaran Inspektorat Jenderal yang berasal dari pagu anggaran Sekretariat Jenderal 8 Miliar, untuk dipergunakan revaluasi asset 34 Provinsi sebesar 3 miliar, tambahan kegiatan pengawasan pengendalian usaha pengadaan barang dan jasa untuk 34 provinsi sebesar 3 miliar, peningkatan program reformasi birokrasi di 8 area perubahan sebesar 2 miliar.

Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI

Sesuai dengan arahan tentang berdasarkan laporan para Eselon 1, setelah mengikuti rapat dengar pendapat kami akan menindak lanjuti sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun demikian kami mohon dukungan Pimpinan dan para anggota untuk dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Eselon 1, untuk kelancaran pelaksanaan.

Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada kesempatan raker kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan mohon persetujuan lebih lanjut terhadap rancangan RKAKL Kementerian Kelautan dan Perikanan dan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Seluruh saran masukan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program, dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Karena tadi saya diminta untuk menjelaskan mungkin highlighted saja, Pak Ketua Wakil Ketua Michael Wattimena.

Permohonan dari Gubernur kenapa beliau katanya menyatakan perang adalah karena permen moratorium terhadap kapal asing, kapal ikan ex asing yang dipertanyakan oleh beliau, padahal moratorium itu sudah tidak ada, jadi terasa beliau dapat masukan yang salah dari hadistnya atau dari penasehatnya. Karena moratorium itu sudah berakhir, moratorium itu dilakukan untuk kapal ikan exasing spesifik 30 GT ke atas. Dari bulan November sampai dengan Mei dan, Mei sampai dengan Oktober waktu itu, kan sudah selesai dan setelah itu dari hasil anet maka diputuskan oleh Pak Presiden, tidak boleh ada lagi kapal exikan asing maupun, Kapal asing maupun investasi dibidang asing di bidang perikanan tangkap, dan itu sudah diputuskan dengan Perpres nomor 44 tahun 2016.

Jadi sebetulnya aneh untuk saya kalau ada tentang moratorium, dan kemudian permintaan dari Ambon adalah karena katanya kapal ikan yang di Ambon itu bukan illegal, jadi antara ilegal dan legal itu sebetulnya sudah diputuskan dalam analisa anep rakyat, pengusahanya juga semua sudah saya panggilin satu per satu sejak awal, dan kita sudah putuskan bersama. Jadi mereka punya waktu sebetulnya 4 tahun lebih untuk petun atau mepetunkan KKP apabila keberatan dengan keputusan pemberhentian kapal ikan asing, kapal ikan exasing, karena mereka beranggapan Pemerintah Maluku ini adalah milik pengusaha Indonesia, jadi itu silakan buktikan saja dipetunkan KKP ketika sudah siap selama 4 tahun ini. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi urusan kapal ikan ekstraksi ini, dan di sini punya permintaan kapal diatas 500 JT, sementara KKP sudah memutuskan kapal di Indonesia ini ya maskimal kapal tangkap 150 juta.

Kapal angkut sudah 200 GT dan itu sudah cukup servicetion. Kalau Kapal 500 GT antara kepulauan Maluku itu dari ujung ke ujung tidak nyampe 500 km Pak Michael, kalau diizinkan Kapal 500 GT hilang lagi semua dan permintaan di sini jadi ini yang saya bacakan saja, moratorium Menteri Susi bukan terhadap Kapal asing, moratorium terhadap itu adalah ilegal karena mereka adalah kapal illegal yang bayar PNBP, jadi ya itu semua ada dalam buku satgas Pak, kalau saya lagi mengulang lagi cara lama dan panjang lagi. Ini sebetulnya para pengusahanya juga udah sama-sama mengerti itu, dulu sebagai penyelesaian cepat adalah kita tutup semua yang memang ini kalau yang ada pidananya ya kita pidanakan, ya seperti kasus Benjina kan ada perbudakan, dan yang di Maluku itu semua PMA Pak, (penanaman modal asing) statusnya tidak ada yang PMDN, kapalnya berbendera Indonesia hanya registrasi saja tapi Benjina itu PMA. Mabiru itu PMA statusnya, bukan perusahaan dalam negeri. Jadi saya kurang mengerti dan sesudah dilakukan pada saat itu Maluku PAD-nya 8,7 miliar rupiah, sementara Tayunyin yang di Thailand itu omsetnya tiga setengah miliar pertahun kan jauh sekali, tinggal setengah miliar U\$ dolar bukan rupiah Pak. Jadi semestinya Pak Gubernur sekarang nuntut orang-orang yang ada di sana untuk membayar retribusi nya, jadi kemudian tuntutan atas kapal diatas 500GT itu tidak mungkin, saat sekarang tidak mungkin kita kabulkan Pak, karena memang ketentuannya 150GT dan 200GT. Jadi kapal exasing, kapal asing, uang asing, perusahaan asing tidak boleh turun di

perikanan tangkap Pak itu udah clear, dan Pemerintah membuka 100% asing masuk untuk pabrik boleh pabrik, tapi nangkap ikan tidak boleh menangkap, ikan harus modal Indonesia orang Indonesia kapal buatan Indonesia, investasinya juga Indonesia itu clear sekali sudah Pak jadi untuk saya, tapi saya pikir beliau sedikit pula mendapatkan informasi. Kemudian untuk persoalan anggaran, saya setuju Maluku mendapatkan tambahan anggaran, saya dukung penuh, tapi tanpa harus membuat pepes khusus gitu maksudnya, karena kalau itu harus ada Perpres lalu masa Presiden harus begini saja masa harus Perpres, ketambahan anggaran 1 triliun, 2 triliun saya dukung, saya akan membantu bicara dengan Menkeu, saya setuju itu Pak, tapi tanpa harus membuat Perpres khusus lumbung ikan nasional, karena Pak Presiden juga hesitated bukan cuma saya gitu loh Pak. Jadi tidak perlu Line, kalau dapet uang juga kan sama saja Pak, anggaran dan kemudian tentang kapal yang sekarang datang ke sana kapal-kapal dari Jawa hasilnya tidak dibongkar di sana, ya jangan salahkan kami itu kan sebetulnya Pemerintah bisa melakukan sendiri disana Pak, Maluku Provinsi punya 13 Pelabuhan, kenapa tidak diberdayakan, kenapa tidak mereka disuruh bongkar disana dilelang diambil retribusinya Pemda mendapatkan musibah Pak, ini yang saya itu banyak sekali Bupati, Bupati katanya Ini sudah milik Provinsi, Provinsi tidak menyentuh karena ada di Kabupaten-Kabupaten. Jadi ini yang saya lihat Pemda itu tidak mau kerja untuk nyari-nyari pemasukan gitu Pak, jadi mestinya TPI dihidupkan saya akan setuju, akan taruh dalam persyaratan izin harus bongkar di tempat, ekspor dari Maluku loh itu yang saya dukung, di Raker DPR ini berapa kali saya bicara tentang silencer apa logistics Indonesia yang tidak masuk akal sekarang ini. Saya punya system silencer seperti gambar ikan supaya Maluku itu ya langsung ke atas lebih dekat ekspor, jangan ikan dari Morotai bawa ke Bitung, bawa ke Makassar, bawa lagi ke atas, ikan dari Papua bawa ke Jakarta dulu baru export ke, padahal kalau HPnya pakai Darwin cepat, jadi tidak ada masalah untuk ekspor langsung, justru itu yang Saya dukung. Karena sekarang ini kan mau ke Jepang, ke Hongkong, ke China jalan dulu ke bawah seperempat bumi dari jalan kebawah baru ke atas itu logistik kita ini yang tidak masuk akal Pak, itu diluar kemampuan saya. Saya bisa mendukung itu langsung apa karantina saya buka langsung disana tidak masalah, tapi harus perhubungan juga kuat untuk meminta, semua kontak shipping Line dunia yang masuk ke Jakarta harus mendarat di pelabuhan-pelabuhan yang dilewati, seperti Amerika logistiknya menjadi murah karena semua shipping, mau Mayami, mau New York semua kapal tuh kalau masuk kaya Amerika semua pelabuhan dia lewati dia mesti tinggal untuk membawa barang yang harus dibawa keluar. Indonesia bisa, kalau mereka tidak mau tidak usah masuk saja, paksa bisa Pak sebetulnya, jangan ikan dari Morotai bawa ke Bitung, Bitung ke Makassar itu sudah, ekportnya dari Makassar itu sudah satu memakan waktu, dua juga berapa biayanya berapa jalan-jalan dari Morotai ke Makassar lewat Bitung, sama logistik untuk kehidupan sehari-hari orang Indonesia Timur juga dibawa dari Surabaya Ayam itu Pak, Makassar dulu Makassar lalu transit Ambon, Ambon baru ke Papua dari Papua Sorong di Fakfak baru turun ke bawah ke Saumlaki, jadi ayam mati pun keliling jalan-jalan dulu, ikan pun seperti itu saya tidak pernah melarang ekspor langsung, saya justru mendukung ekspor langsung dari semua hasil perikanan, supaya apa supaya

hemat efisien jadi saya tidak mengerti kenapa aku bicara begitu. Kemudian untuk meminta kapal-kapal Jawa bongkar di sana setuju saya, saya setujuin Pak. Karena sekarang karena tidak bongkar di sana juga kita antri portit banyak laporan yang tidak sesuai. Kemudian jadi hampir semua yang beliau minta ada di saya bisa saya setuju saya setuju Pak, ekspor langsung top setuju Pak, bongkar disana sok silakan, penambahan penambahan anggaran Monggo tanpa harus bikin Perpres Line lumbung ikan nasional. Kemudian ilegal yang kapal ikan exasing itu sudah sudah tutup buku sudah tidak boleh bicara lagi Pak, karena itu sudah tidak ada moratorium, Permennya tidak ada sudah. Kenapa diomelin Permen, karena yang ada Perpes sudah dan memang Asing tidak boleh, dan kita tidak perlu kapal-kapal besar karena Maluku itu ZEE-nya ya cuman antar pulau saja Pak, kalau dikasih kapal-kapal yang jaringnya 50 km 10 kapal saja berderet sudah habis itu Pak, jadi seperti itu kira-kira. Jadi kemudian tentang Provinsi Kepulauan itu bukan wewenang saya, kemudian yang kekuasaan Gubernur 12 mil yaitu ketentuan undang-undang Pak, tidak bisa dirubah oleh saya. Jadi saya dukung untuk ekspor langsung dari Ambon kah dari Tual kah dari di saumlaki saya dukung Pak. Tambahan anggaran, saya dukung tapi ini harus dihidupkan Pak itu asset 13 Pelabuhan mati karena setelah Undang-Undang Otonomi Daerah dari Pemda ke Provinsi, Provinsi nya nggak ngapa-ngapain tapi komplin uang engga masukan, kan aneh untuk saya. Mestinya Pelabuhan itu bisa untuk cari uang, kapal-kapal dari Jawa seperti itu kira-kira dan kapal dibawah 30 GT di Maluku itu lebih banyak daripada kapal yang izin pusat.

Kira-kira seperti itu, terima kasih Pak.

Akhirul kalam

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Saya tadi kelewatkan lalu melewati Dirut Bulog harus yang menyampaikan program-program, ya saya pikir mungkin tadi cari-cari Bapak ke mana rupanya ada disitu harusnya duduk di depan. Pak Dirut Bulog mungkin salah satu Maaf, salah satu Dirjen dari KKP disini untuk menyampaikan.

Pak Buas disitu saja Pak?

Karena Bapak mempertanggungjawabkan anggaran juga, jadi mungkin di sini di antara salah satu aja salah satu jangan sampai tiga-tiga salah satu ya.

Ohiya Pak Buas harus di sebelah Bu Susi,

Bu Susi maunya deket Pak Buasm, dari pada Pak Milanto lebih enak sama Pak Buwas,

Disini Pak lewat sini saja Pak iya depan Pak,

Pak Murat sayang Ibu, Pak Buas juga sayang sama Ibu.

Pak Murat itu Gubernur itu Gubernur Maluku,

Kalau Ibu lupa.

Kami persilakan.

Terima kasih Bu Susi atas penjelasannya, tambahan penjelasan yang luar biasa mencerahkan kami. Karena kami juga ada surprise, ada luar biasa keras disana, ada komentar disana. Nah sekarang kita sudah memahami dan kita bisa mengambil sikapnya.

Kami persilakan dari Dirut Bulog.

DIRUT BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Terima kasih.

Bismillahirrohmaanirrohiem

**Yang saya hormati Ketua dan berserta Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak dan Ibu Menteri yang kami hormati.**

Izinkanlah kami untuk menyampaikan usulan Bulog dalam APBN 2020.

Community beras atau JPP untuk asumsi kami kebutuhan untuk nasional yaitu adalah Rp.30.371.000 ton beras. Untuk OPCBP sesuai dengan ketentuan usulan pengolahan Bulog yaitu Rp1.200.000 ton, asumsi APB-nya adalah Rp.10.742 dan asumsi harga jualnya adalah Rp.8.533. Usulan anggaran yang kita butuhkan untuk CBB yaitu Rp.2.650.800.000.000, dan untuk kebutuhan bencana alam dan lainnya yaitu yang kita butuhkan adalah Rp.300.000 ton dengan asumsi APB yaitu Rp.10.742, maka yang kita usulkan anggaran untuk 2020 adalah Rp.3.222.600.000.000, jumlah beras atau jumlah keseluruhannya yaitu Rp. 5.873.400.000.000. Asumsi perkiraan inflasi tahun 2020 adalah sebesar 4% HPP diasumsikan tetap menggunakan HPP dalam Inpres nomor 5 tahun 2015, biaya-biaya operasional lainnya dananya disesuaikan dengan perkiraan kenaikan inflasi maka diperoleh perhitungan HPB sebesar Rp.10.742. Usulan Bulog dalam APBN tahun 2020 community selain beras yaitu jagung kebutuhan nasional Rp.19.749ton program cadangan jagung. Tata busananya adalah Rp.39.5000 ton. Asumsi harga HPP yaitu Rp.4.680, asumsi harga jual adalah Rp.3.800. Usulan anggaran yang kami ajukan adalah Rp.347.581.896.00. Untuk keledai kebutuhan nasional adalah Rp.2.874.000 ton, dengan usulan pengolahan Bulog adalah Rp.575.000 ton, HPP-nya Rp.11.799, harga jualnya Rp.8.500. Yang kita usulkan untuk HBP-nya adalah untuk anggaran adalah Rp.1.896.360.310.000. Untuk kebutuhan gula asumsi kebutuhan nasional adalah Rp.5.222.000 ton, untuk kuantum usulan pengolahan Bulog adalah Rp.1.000.040 ton dan HPP yaitu Rp.12.740, asumsi harga jualnya adalah Rp9.000 dan kita usulkan untuk anggaran 2020 adalah Rp.3.891.264.300.000. Untuk kebutuhan daging kebutuhan nasional adalah Rp.799.000 ton, kuantum usulan pengolahan Bulog yang kita jual adalah Rp.160.000 ton, dengan asumsi APBD adalah Rp.83.876, asumsi harga jualnya adalah Rp.80.000. Maka usulan anggaran yang akan kami ajukan untuk 2020 adalah sebesar

Rp.619.548.638.520. Berarti secara keseluruhan yang kita ajukan adalah Rp.6.754.755.138.290.

Lanjut usulan Bulog yang pertama adalah memperhatikan stok beras yang dikuasai oleh Perum Bulog, mohon dukungan penambahan pangsa pasar untuk komoditi beras di antaranya, sekarang yang sedang kita lakukan adalah untuk bantuan pangan non tunai (YPNT).

Yang kedua penyesuaian volume penugasan hingga seimbang dengan volume penugasan penyaluran.

Yang ketiga dibutuhkan evaluasi atas harga pembelian Pemerintah dari Inpres Nomor 5 Tahun 2015 yang posisinya kini semakin jauh di bawah harga pasaran umum yaitu syarat kualitas tidak setara dengan syarat harga lagi.

Yang keempat mengingat saat ini untuk membiayai kegiatan operasional penugasan yang diberikan Pemerintah menggunakan modal Perum Bulog yang berasal dari pinjaman kredit perbankan dengan bunga komersial, kiranya dapat diberikan jaminan kredit Pemerintah atau pernyataan modal kerja Pemerintah agar dapat membantu struktur keuangan Perum Bulog, khususnya dalam kegiatan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah.

Sekitanya ini yang dapat bisa kami sampaikan kami mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI.

Lebih kurangnya kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Demikian penjelasan dari Pemerintah.

Selanjutnya kami persilahkan temen-temen disini sudah ada daftar yang akan bertanya.

Namun sebelum saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya menyampaikan usulan saja, karena kita hari ini fokus dalam pembahasan anggaran, kami mohon agenda pertanyaan apapun pendalamannya fokus tentang anggaran dulu. Hal-hal lain tentang pengawasan dan tentang legislasinya nanti kita ada forum khusus, karena setelah ini begitu kita sepakat untuk menerima Pagu indikatif ini kita akan mengadakan pendalaman satu kali lagi, sehingga semuanya clear masing-masing kegiatan sampai ke tingkat basis terendah itu kita semua tahu materinya apa saja. Sehingga saya usulkan itu, sehingga mudah-mudahan waktu kita bisa efektif dan efisien.

Kami mulai dari tim Banggar dulu, karena ini berhubungan dengan anggaran.
Saya persilakan Pak Cucun dan dari Banggar Komisi IV yang ada hadir hari ini Pak Andi Akmal, mungkin kalau tadi Pak Andi Akmal sudah menyampaikan.
Mungkin ada lagi Banggar, Ibu Khasriah?
Kami persilakan Pak Cucun.

F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.):

Terima kasih Ketua yang baik hati dan ganteng.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Komisi IV, Sahabat-Sahabat Anggota dan Seluruh Mitra.

Saya pertama menyampaikan terima kasih paparannya semua, cuma sedikit agak kecewa. Ini best line untuk Pemerintahan baru, tetapi anggaran Kementerian itu kalau dulu saya masih ingat best line Kementerian Pertanian aja kalau dulu di 30 Triliun, 32. Tapi kenapa sekarang ini malah best linanya 21 Pak. Kita ini harus berpikir, kadang saya Pak di Banggar Pak Menteri, saya itu sering ngotot. Kalau untuk urusan rakyat subsidi 1 triliun aja dipotong, saya paling ngotot Pak. Nggak boleh, yang lain silakan potong tapi urusan subsidi untuk rakyat nggak boleh dipotong. Bukan karena penuh sekarang rapat, asli saya ini tanya sama temen-temen saya di Banggar. Tapi Bapak-Bapak ini nggak bisa meyakinkan kami, ketika kami harus berjuang di Banggar mengusulkan anggaran yang ini bener-bener urusan-urusan apa, ketahanan pangan Kementerian Pangan di sini juga Komisi IV semua. Kalau bicara dengan Infrastruktur dan sebagainya, ya kita support program nawacita siapa Pak Presiden, orang kita partai koalisi Pak.

Jadi tetapi ini yang paling penting disini, di Pertanian Kehutanan KKP cadangan stock pangannya ada di Bulog, tapi yang Bapak yakin kan tadi kami ini diawal, kenapa ketika Bapak-Bapak merancang dulu dengan BAPPENAS, kemudian dengan Ibu Menteri nggak bisa meyakinkan, best linanya sudah kembalikan lagi best line tahun 2014 dulu ketika kita di awal 32 triliun, iya 2015 telah kita bahas. Nah ini yang menjadi saya pertanyaan pertama kepada Ibu Menteri LHK.

Bu ada bagus ini 1 skema pembiayaan Pak Ketua, ini para Pimpinan di Komisi IV saya pingin nanya, yang di dulu nggak ada. Skema pembiayaan itu ada dua, hutang dan non hutang. Tapi sekarang ada skema pembiayaan investasi, termasuk ya kami senang ada 1 Kementerian Keuangan berani membuat kebijakan dan saya juga usul, kalau emang itu untuk percepatan dan untuk pemanfaatannya bagaimana program pembangunan, ada 1 skema BLU yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 2,01 triliun itu Bu, nah inikan barang baru nih.

Saya minta dijelaskan juga disini biar nanti saya juga tidak panjang dan bisa meyakinkan bahwa skema pembiayaan yang 2 triliun itu bisa tidak diganggu dan tidak digoda sama yang lain, karena itu udah urusan Bapak dan Ibu ini seharusnya kan meyakinkan kami kami iya Pak Ketua, biar ada bahan yang harus saya bawa nanti ketika rapat di Badan Anggaran bagaimana bahwa anggaran ini jangan diganggu gugat, betul-betul ini usulan untuk ketahanan pangan kemudian panahan, bagaimana untuk menjaga tata kelola stabilitas disinikan kuncinya di Komisi IV gitu.

Makanya Saya tadi melihat beberapa hal paparan dari Bapak dan Ibu terima kasih, walaupun kemarin betul kenapa sampai tadi minta bukan scors ya, ketika sebelum mulai kita tunda dulu Rapat ini yang pasti apa yang Bapak dan Ibu kita lakukan disini kemitraan yang lebih cepat dengan Bapak-Bapak, semua Bu Menteri, ini Bu Menteri KKP ini mohon maaf ya ada catatan khusus untuk Ibu-Ibu Susi Bu. Yang kita lakukan kita duduk bersama disini jangan sedikitpun siapa yang mau pilih paling depan, kita sama-sama berpikir untuk rakyat, kami ini dipilih oleh rakyat boleh Ibu misalkan rakyat yang mana kami jelas proses Pemilunya diproses di Pemilu Legislatif, kemarin itu rakyat yang memilih kami ini, menitipkan apa berbagai hak hal-hal aspirasi dan kami disumpah untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Kalau toh misalkan teman-teman kami disini menuntut agar keras aspirasi supaya masuk, kemudian tidak sinkron dengan keinginan Ibu, toh mekanisme ketatanegaraan kita sudah berjalan, kita saling menghargai antar lembaga, kita saling menghargai antar institusi, baik Ibu sebagai eksekutif, kami legislative, semua itu harus dijunjung tinggi diatas dengan etika yang ada, kami menghargai sikap dan apa kegigihan Ibu. Kita apresied semua mitra-mitra Komisi IV ini paling ini paling top semuanya di era Pak Jokowi kemarin, dan mudah-mudahan masih tetap terus melanjutkan dan yang belum masuk ke kabinet bisa masuk kabinet. Iya kita mudah-mudahan melihat bagaimana apakah Bulog nanti bisa memegang salah satu Kementerian di kabinet yang Pak Jokowi ini juga.

Kemudian Ibu satu saya yang minta tadi, bagaimana Ibu menyampaikan semua ketika Kementerian Lembaga diujung paparannya itu. Mohon Bapak dan Ibu anggota DPR untuk koordinasi dengan Eselon I kami, saya minta revisi itu kalimat ya, karena hak budgeting ada di kami. Ibu perintahnya ke Eselon I, silakan untuk koordinasi dengan Bapak dan Ibu anggota DPR disini. Itu saya minta revisi kalimat tadi ya Ibu. Ibu kebalik, Pimpinan, Ketua dan Anggota silakan untuk berkordinasi dengan Eselon I kami, itu kalimat yang tidak boleh disampaikan di lembaga tinggi yang sama-sama atas Ibu dengan kami, catatat iya Bu iya. Jadi kalimatnya terbalik gitu. Jadi Eselon I Ibu yang diperintahkan oleh Ibu berkoordinasi dengan kami dan mohon catatan Bapak Ibu semua.

Kenapa ketika kemarin kita rapat gagal?

Ini perintah Ibu Menteri udah seperti itu, tapi kenapa Bapak dan Ibu Eselon I ini tidak melaksanakan perintah bosnya. Makanya kalau rapat nanti kita hajar juga, ennga boleh balik lagi nunggu perintah Ibu Menteri, sudah perintah Ibu Menteri seperti itu. Makanya supaya kami juga bisa berjuang, tadi Ibu Menteri, kok anggaran kami ini dipotong-potong, Bu yakinkan saya, saya perjuangkan nanti. Harusnya hari ini jam 13 kita raker, tapi karena nunggu Bapak dan Ibu diundur besok Pak, tinggal Komisi IV nih

yang ketinggalan. Jadi untuk raker itu kita undurin besok jam 13, agar-agar Komisi IV belum selesai ini. Nah makanya, terima kasih dan saya minta jelaskan Ibu Menteri LHK tadi skema pembiayaan yang melalui skema BLU yang bukan masuk dipagu anggaran ini. Itu kemudian juga yang lain-lain, Pak Menteri Pertanian terima kasih kerja sama selama ini, tinggal janji-janji yang belum selesai, semoga segera lancar diinternal Bapak disana, iya kita menunggu sekali betul tadi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman.

Terima kasih.

***Wauallahumafik Ilqaumil Toriq
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam

Kami persilakan Ibu Kasriah dulu ya.

F-PPP (HJ. KASRIAH):

**Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan semuanya,
Yang saya hormati dari Menteri Pertanian,
Yang saya hormati Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ibu Menteri Perikanan dan Kelautan,
Bapak Dirut yang saya hormati, beserta seluruh jajaran yang hadir,
Saudara-saudara saya Komisi IV yang saya banggakan.**

Tadi sudah banyak paparan yang disampaikan Pak Cucun tadi, bahwa kami di Banggar dipercayakan untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak dan fungsi empat untuk memperjuangkan demi kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Yang mana tadi sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Cucun. oleh sebab itu tadi saya tidak terlalu banyak lagi menyampaikan apa yang telah kami hampir sama semua materi yang kami akan sampaikan. Yang harapan saya ada hal-hal lagi baik Kementerian Perikanan, Pertanian, Kehutanan yang masih belum terrealisasi anggaran-anggaran yang 2019, mudah-mudahan semuanya nanti terrealisasi. Tidak perlu saya ungkap disini, nanti pada saat rapat-rapat berikutnya.

Jadi apa yang disampaikan Pak Cucun, Pak Cucun juga tadi masalah LHK, iya ingin juga kami mendengar, sehingga pada saat nanti di Banggar Pak kami bisa mempertahankan apa yang diinginkan oleh Bapak, sehingga anggaran-anggaran ini tidak akan berubah lagi.

Saya kira ini Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Kami persilakan Pak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,

Yang pertama tentu sebagai anggota Banggar, anggota Komisi IV, dan Kapoksi PKS kita dapat menerima ya penjelasan dari 3 Kementerian dan dari Bulog tadi Pak ya masalah anggaran. Ini yang jelas tidak bisa kita perjuangkan untuk naik Pak Ketua, karena sudah dikunci anggaran untuk belanja pusat. Dan sebenarnya kalau saya boleh melengkapi Pak Ketua untuk LHK sebenarnya, sebenarnya dimungkinkan anggarannya bisa naik Pak Ketua, tapi dengan catatan bahwa harus menaikan PNPB-nya (penerimaan negara bukan pajaknya), karena Undang-Undang PNBB itu mengatakan bahwa 60% bisa dibelanjakan oleh Kementerian teknis. Tapi kemari di rapat Banggar Pak Ketua, Kementerian LHK tidak menyetujui untuk kenaikan, iya kita serahkan sajalah kepada LHK-nya dah. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kalau memang LHK ada program yang mendesak untuk masyarakat, saya kira kita dukunglah untuk PNPB, nanti itu diserahkan anggarannya kepada Kementerian LHK-nya.

Kemudian yang kedua Pak Ketua kita bicara anggaran mengenai masalah kepentingan untuk Pertanian ya, kemarin kita bahas panjang ya di Eselon I. Pak Menteri, kita cuman meminta sekali lagi bahwa diterima bukan berarti kita tidak ada pembahasan untuk pergeseran, karena saya melihat di beberapa di Eselon I itu banyak program-program menurut kami itu tidak terlalu penting dan bisa kita pindahkan kepada program yang dibutuhkan masyarakat. Seperti di Pertanian misalnya, di Sekjen itu anggarannya terlalu tinggi naiknya bisa digeser sebenarnya ke Eselon I yang lainnya, misalnya bisa untuk irigrasi tersier, untuk bantuan bibit ternak, bantuan bibit padi jagung. Saya kira bisa digeser kesana Pak Menteri, sehingga masyarakat kita betul-betul mendapatkan manfaat maslahat yang besar dari APBN kita gitu.

Begitu pun yang KPP juga mungkin ada yang lainnya dan Bu Susi juga sudah menjelaskan ya, bagus Bu penjelasannya tadi. Karena masalah di Tanah Air kita ini adalah masalah di kepala daerah kita yang setelah mendapatkan kewenangan kehutanan KKP mereka kurang korordinasi dengan Bupati-nya, dengan Walikota-nya sehingga banyak yang idel ini, banyak asset ini tidak dimaksimalkan. Dan mohon maaf

ya, daerah ini memang hanya meminta anggaran ke Pusat sehingga mereka tidak bisa memaksimalkan asset yang ada di daerahnya iya.

Kemudian untuk Kementan juga ya, kita berharap juga Pak bagaimana memaksimalkan Litbank dan SDM, karena masalah kita Pak Menteri adalah masalah kelompok tani kita ini yang belum maju, belum modern. Kita berharap kartu tani itu betul-betul bisa didorong Pak Menteri, sehingga Pertanian kita ini betul-betul memang nanti basis data, basis data produksi, basis data kebutuhan pupuk betul-betul ini bisa data yang failed.

Nah satu lagi Pak Ketua masalah DAK ini saya kira Komisi IV ini kita selalu membahas DAK tapi, masukan-masukan yang diberikan kepada Kementerian ya jarang diterima gitu ya, padahal kita bahwa DAK ini sebenarnya adalah ini juga bagian dari pada menerima aspirasi atau masukan dari pada DPR, terutama untuk penempatan daerah pemilihan. Oleh karena itu Pak Ketua untuk DAK ini saya kira program-program diusulkan itu kita terima, cuman nantinya untuk daerah-daerah memang yang potensial untuk LHK, untuk Pertanian, KKP, ini 3 Kementerian ini bisa menerima, jangan hanya anggota memasukan usulan tapi engga ada yang diterima, kalau begini nggausah dibahas DAK-nya itu. Kalau kemarin di Banggar itu Pak Ketua kita sekarang DAK-nya dibuka semuanya, iya jadi kita semua bisa melihat dan bisa lebih transparan mana daerah-daerah yang memang membutuhkan dari pada anggaran untuk tambahan DAK itu.

Nah kemudian yang terakhir untuk Pak Bulog ya, Pak Kepala Bulog. Sebenarnya kita bisa memahami Pak sebenarnya kesulitan Bulog, cuman saya kemarin dari Bulog dari Kementerian Keuangan tidak ada usulan untuk penyertaan modal negara Pak, hanya dua kemarin lembaga di Banggar itu. Iya jadi kita berharap Pak buat kedepannya mungkin bisa mengusulkan ke Bappenas atau Keuangan agar bisa diusulkan penyertaan modal negara untuk modal kerja. Dan kami biasanya di Banggar tindak pernah menolak Pak karena itu kebutuhan operasional dari pada BUMN, kemarin itu yang mendapatkan adalah muda bergulir ya, iya ada dua kemarin yang mendapatkan BLU Pak.

Jadi saya kira kedepannya Pak Buwas ini kita tidak terlalu membahas, karena kesulitannya Bulog kita pahami. Tapi selama ini kita mendorong Pak supaya beras rastra itu dari Bulog Pak, kita bahkan sudah mendengar keputusan bahwa beras rastra itu tidak lagi dari pihak luar ya Pak ya tapi dari Bulog, karena kalau ini Bulog tidak diperkuat wah bahaya negeri kita ini dari sisi distribusi maupun dari sisi yang lainnya.

Saya kira demikian Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Masih ada dari Banggar? Sudah engga ada lagi Banggar.

Baik kalau begitu kami berikan kesempatan Pak Hermanto, mohon maaf Pak Herman, kalau Agus Hermanto ada di Pimpinan DPR Pak.

Kami persilakan Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi IV

Aasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Direktur Umum, Dirut Bulog.

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa prinsip anggaran itu disadarkan pada 3 hal (Prinsip Efisiensi, Prinsip Efektif, Prinsip adanya ketersediaan strategi (suara kurang jelas). Jadi saya berpikir buat apa anggaran besar, kalau tidak efektif dan tidak efisien untuk menyelesaikan persoalan-persoalan disektor kemiskinan. Ini persoalan kita. Tapi juga kalau pun misalnya anggaran kita kecil, tapi kita punya strategi efektif dan efisien, dan punya rode maps untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, saya pikir ini lebih mengutamakan ini. Ini dalam rangka kita menjaga ketersediaan anggaran.

Nah saya melihat berapa agenda dan program yang disusun oleh berapa Kementerian ini. Ini lebih pada bersifat evorial saja, besar-besaran, yang penting besar banyak gitu. Tapi persoalan kemiskinan engga pernah tuntas. Persoalan kemiskinan disektor pertanian, disektor nelayan, disektor masyarakat sekitar hutan itu sangat rentan, berapa pun juga anggaran yang kita bantu disana mereka tetap miskin. Kecuali kita punya strategi rote maps untuk mengawal program ini, mengangkat harta dan martabat petani itu menjadi orang yang berubah nasibnya. Ini saya cermati di dapil-dapil itu orang miskin itu petani-petani, nelayan, dan masyarakat sekita hutan dan kita sudah bantu, tapi daya belinya masih juga tetap rendah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Saya pikir anggaran kita kalau pun besar berapa gitu, kalau tidak ini kita selesaikan. Jadi saya misi saya sebagai anggota DPR bisa minta 3 Menteri dan 1 Bulog ini harus kesana orangnya. Saya belum lihat nih dari program yang dipaparkan oleh Kementerian kecuali Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Dia punya road maps yang jelas, tapi Kementerian yang lain saya melihat belum. Tapi walaupun sudah jelas saya melihat masyarakat sekitar hutan ini masih tetap juga karena apa, karena pengawalannya tidak ada, tidak merubah nasib. Jadi ini harus kita perkuat anggaran kita kedepan ini, sebagaimana oleh anggota yang lain menyebutkan best line kita kalau misalnya kita sudah pertimbangkan secara matang dan ini adalah dasar untuk ikita

memasuki periode Pemerintahan berikutnya, saya pikir ini harus kita pegang. Jangan asal membuat anggaran, membuat program, tetapi terus diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif saja, saya pikir tidak merubah nasib bangsa ini.

Oleh karena itu saya minta pihak Pemerintah dan juga anggota, yakni harus menjadi bahan strategi umum kita untuk bangsa dan negara kita ini. Jangan bersifat sectoral. Saya melihat misalnya di Kementerian Pertanian produksi pertanian soclose, tapi dipihak sana mengimpor terus, ini apa maknanya gitu loh. Nah ini menandakan bahwa strategi kita untuk memajukan negara dan bangsa ini, itu hanya omong kosong gitu. Kita sudah punya undang-undang pangan yang disebut di dalamnya ada klosul kedaulatan pangan, kita harus punya komitmen kesana. Kedaulatan pangan itu adalah kita mengkonsumsi apa yang kita produksi, begitu Pak. Nah yang ini yang harus kita arahkan. Saya komitme saya disini, bukan persoalan besar-besar, bukan persoalan kecil-kecilan, tapi efektif, efisien dan punya strategi roadmapsnya memberantas kemiskinan.

Nah tentunya Bapak Ibu kami sebagai anggota Dewan, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Kita ini punya disumpah, klasur sumpahnya itu saya coba bacakan ini. (Anggota DPR mewajib memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya). Dan itu pada saya kita berkampanye kita sampaikan ke masyarakat bahwa kita aka memperuangkan nasibnya, memperbaiki nasibnya, menyalurkan program di dapilnya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, ada janji-janji yang kita sampaikan itu ke Pemerintah dan lain sebagainya. Ini sampai sekarang masyarakat petani, nelayan di daekan itu masih nuntut. Saya pikir ini perlu kita selesaikan dulu, sebelum kita masuk ke anggaran periode Pemerintahan berikutnya. Ini harus kita penuh, janji-janji yang pada saat itu sudah kita penuh dan dibuat relistnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan jejak, lalu kita pindah keperiode berikutnya tanpa ada satu perbaikannya.

Saya pikir ini yang perlu kita selesaikan anggaran dan program 2019, manayang menjadi hutang kita, kita selesaikan sekarang. Kita tidak tau lagi ini, ini Bapak Ibu menjadi Menteri apa tidak, iyakan setelah nanti Bapak Ibu tidak menjadi Menteri yang dituntut bukan hanya di dunia ini. Kalau di akhirat nanti siapa, iyakan. Kewajiban kita sebagai kemandusia itu ada dua dimensi, dimensi kemanusiaan dan dimensi transedental. Kita janji hari ini, kita tidak penuh, kalau kita tidak penuh yang nuntut nanti di akhirat, siapa yang mampu membayarnya.

Nah ini Bapak Ibu yang saya inginkan supaya anggaran ini yang kemarin sudah kita bahas, yang belum tuntas secara detail termuat disini. Itu saya minta itu semua harus ditampung disini. Dan kemarin kita kan sudah detail, tapikan ada juga yang belum terpenuhi, saya pikir itu harus di dan bahan ini pun harus kita terima hari ini, kita tidak bisa mencermati dalam waktu yang singkat apa-apa yang terjadi dalam dokumen ini. Tradisi kita 3 hari sebelum rapat itu harus kita terima, tapi hari ini kita baru ini pas mau pintu tadi kita baru ke 5. Dan nanti kalau misalkan ada rapat lagi nih, ada rapat pendalaman dan ada raker berikutnya, saya minta bahan ini 3 hari sebelum rapat itu harus sudah kita terima. Karena kita disitulah akan melihat apakah anggaran ini memang sudah memadai untuk membrantas kemiskinan. Kalau tidak ya, kita nanti evaluasi lagi.

Begitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tunggu Pak, diklarifikasi dulu.

Materi yang belum Bapak terima 3 hari sebelumnya materi mana dari mana?

PEMERINTAH:

Kami sudah kirim 3 hari sebelumnya Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini semuanya saya terima hari ini.

KETUA RAPAT:

Bapak?

Saya terima di rumah hari Jum'at dikirim di rumah, saya tidak tau.

Silakan Pak lanjut.

PEMERINTAH:

Kami sudah kirim 3 hari sebelumnya Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Saya nerima hari ini engga tau kawan yang lain, belum juga kata temen.

Nah itu Bapak Ibu, iya jadi kita memang anggota DPR punya hak buat berbicara, tapi kalau di hanya diberi dokumen kaya begini mau dikata apa, kan kita punya keterbatasan juga, kita ini juga manusia punya keterbatasan dalam hal membaca. Begitu Pak. Dan kita tidak tau ini apa-apa yang ada di dalam dokumen ini, padahal ini bagus-bagus semua.

Nah jadi ini yang perlu saya minta, nanti kalau ada pendalaman lagi saya pikir ini perlu kita cermati lebih jauh, karena juga ada beberapa persoalan yang sebagai anggota dewan perlu menyampaikannya kedalam program ini.

Nah juga kita ingatkan kepada pihak Pemerintah ini ada beberapa aspirasi dari masyarakat itu juga belum terpenuhi, misalnya begini nih, ini ada forum komunikasi sarjana membangun desa wirausahawan pendamping SMDWP Nasional, ini sudah berkali-kali dibahas tapi tidak penuh engga ada realisasinya seperti apa, ini juga

sumber daya manusia yang terpilih yang kita biayai oleh negara, tapi sampai sekarang mereka masih menuntut untuk bisa dipekerjakan lagi. Nah saya pikir ini hal-hal beginikan sudah janji kita bersama disini. Saya minta nanti pihak Kementerian ini saya tidak mau panjang lebar tentang hal ini, saya serahkan saja kepada Menteri.

KETUA RAPAT:

Izin Pimpinan dulu harusnya ya, tapi sudahlah Pimpinan izinkan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Jadi Bapak Ibu romimakumullah, menurut saya ini hal-hal begini ini janji-janji begini ini harus kita tunaikan, iya kan supaya nanti saya ingin menyelamatkan Bapak Ibu di surga di akhirat nanti, supaya tidak ada lagi tagihan di akhirat gitu.

Juga saya minta penjelasan dari Ibu Menteri Lingkungan dan Kehutanan terkait dengan, sekarang ini ada 1278 hotspot di Sumatera, nah ini seperti apa gambarannya, karena ini kalau kita biarkan ini bisa mengganggu asap dan bisa nanti kita dikenal lagi dengan menjadi pengeskor asap begitu.

Dan kemudian yang ke kita, tadi yang pertama ke Pak Menteri Pertanian dan yang kedua Ibu Menteri.

Ke Bulog saya ingin melihat, apakah HPP ini, ini memenuhi rasa keadilan tidak terhadap petani? Karena saya melihat harga HPP ini yang banyak dikeluhkan oleh petani. Saya minta supaya ini, ini karena dilematis iya. Kemudian juga terkait dengan soal peran Bulog yang sekarang ini hanya dia bisa menyerap tapi tidak bisa mengalokasikan. Jadi bisa kemungkinan terjadi itu adalah beras numpuk di gudang dan bisa berhadapan dengan persoalan kadar luarsa, dan tingkat pembusukan, dan segala macamnya. Nah ini saya minta supaya Bulog ini selain dari pada soal menyerap juga menyalurkan berasnya.

Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

KKP Bapak engga kasih? Sudah.

Pilhkasih-pilhkasih.

Terima kasih.

Saya engga tau ya saya dapat undangan dapat penjelasan dari Pertanian sudah hari Jum'at yang lalu, oh setiap rumah, engga saya baca juga, karena samakan kurang lebih anggaran itu cara ininya begini-beginin aja.

Selanjutnya kami persilakan ke Pak Sulaeman Hamzah.

Siap-siap Pak Irwan Zulfikar.

FP-NASDEM (H. SULAEMAN L. HAMZAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pimpinan dan kawan-kawan anggota yang saya hormati,
Pak Menteri Pertanian, Menteri LHK dan Menteri KKP, Perum Bulog, Pak Dirut
yang saya hormati,
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.**

Saya singkat saja Pak Ketua, pertama saya mau sampaikan sekitar situasi Papua yang memang kita tau bersama sampai dengan terakhir ini kalau kita bilang lahan gambut di padam diatas dibawah kalau tidak tuntas berarti diatas muncul lagi, kira-kira itu ilustrasinya. Dan memang keadaan itu secara umum kita lihat juga sudah bagus, saya sendiri keliling Pak di Jayapura, Marauke, terakhir kemarin saya ketemu Boven Digoel untuk memastikan siatusi di Kabupaten yang sekali pun sudah dianggap aman tapi saya pastikan kesana. Ternyata di Boven Digoel itu ada kasus lagi yang tadi sempat bisik dengan Ibu Menteri, 1512 orang yang sudah eksodus dari lahan Pertambangan di wilayah gunung mereka ke Marauke dan masih ada yang tersisa seribu lebih lagi yang disana. Jadi kurang lebih penambang liar yang tidak memiliki izin tapi mempunyai Pimpinan dan situasi memuncak ketika para Pimpinan kena perebutan lahan lalu kemudian itu dikelompok yang satu menyerang kelompok yang lain, terjadi kebakaran ada yang meninggal ada yang kena parang, kena panah, tapi ada juga yang dibakar, 3 jenazah dievakuasi ke Asmat, dan hari ini dibawa Himikan, kemudian nanti dibawa ke Jayapura untuk diotopsi.

Yang lain di Boven Digoel itu juga ternyata memang tidak diinterogasi kasus yang terjadi itu, saya pertemuannya di Kapolres bersama dengan Bupati, Wakil Bupati, para Kepala Suku, dan seluruh Ketua Paguyuban. Situasi itu yang menurut saya juga saya ragukan kenapa tidak diidentifikasi permasalahan yang muncul, orang galihan c aja harus ada izin, apa lgi ini tambang emas dan besas=r-besaran disana. Lebih pada siatusi lingkungan dan korba yang muncul tadi, dan tadi saya bisik juga sama Bu Menteri kalau bisa ini ada penanganan khusus dari Lingkungan Hidup dan kemudian dari pihak lain juga nanti saya akan ajak untuk kepentingan itu. Secara umum di Kota Jayapura yang menghebohkan itu, itu sekarang sudah padam tetap memang perlu ada kesungguhan dari Pemerintah dan juga masyarakat setempat untuk sama-sama menjaga hubungan kekeluargaan yang sudah terbangun selama ini. Hanya ada satu yang perlu saya sampaikan, situasi mengemuka itu ketika ada kejadian di Surabaya yang menimpah Mahasiswa, dan kemudian dimana-mana juga penggerak utamanya di Mahasiswa. Tapi Mahasiswa ini sebetulnya mereka pada koridor yang sesungguhnya, nah penyelusupnya itu yang membuat masalah besar dan karena kejadian itu saya

mohon uluran tangan Pak Menteri Pertanian, Pak Dirut Bulog, ada 43 asrama yang memang asrama ini mereka tidak display baik oleh Kabupaten induknya sehingga perlu ada penanganan disitu. Menurut saya juga tidak banyak-banyak, 43 asrama itu penghuninya kurang lebih 300san persatu asrama dan barang kali kalo ada kebijakan ceasar yang barang kali dari Bulog mungkin bisa dibantu mereka beras saja untuk setiap bulan dimasing-masing asrama. Itu yang saya maksudkan untuk bisa, pendatannya bisa saja Pak nanti di Papua, Bulog Papua bisa saja dilibatkan untuk melihat langsung dan bisa langsung melayani Pak, saya tidak perlu harus terlibat disana, tapi ini dari kemanusiaan dan untuk menjaga ketentraman. Asrama inikan anak-anak mahasiswa ini ketika mereka makan tidak cukup dan ini mereka pasti pikirannya macam-macam gitu, tapi kalau sudah dibantu insyaallah aman Pak.

Yang kedua mungkin pada lebih teknis, yang saya sampaikan kepada Pak Menteri Pertanian, beberapa peralatan yang kami terima terakhir ini kan dari merek China yang isonya tidak sesuai dengan situasi disana, ada combine juga yang kami terima di wilayah Marauke itu juga merek China yang tidak bisa digunakan disana karena structure tanah dan lain-lain. Yang kecil juga dulu saya sudah pernah sampaikan combine kecil dan sedang tidak harus dikirim kesana Pak, kalau bisa diganti dengan yang lainnya sehingga bisa digunakan untuk itu, kalau bisa dirubah dengan kubote atau yanmar yang sesuai dengan keadaan disana, bisa bertahan lama, kalau tidak ini pakai sebentar rusak dan seterusnya, jadi itu tidak menolong masyarakat.

Kemudian untuk KKP saya juga perlu sampaikan 5 unit kapal yang dulu diserahkan resmi di Marauke yang waktu itu dari kekurangan tapi kemudian dilengkapi, itu juga tidak stabil jalan. Saya barang kali usul disini, ini menolong masyarakat local disana yang sehari-hari mereka hidupnya itu cuman dengan jarring buang di pinggir laut atau dengan perahu dayung diseperti itu saja. Yang pas menurut saya disana itu pakai longboat saja atau dengan jongson, dan itu permintaan masyarakat dari kampung ke kampung yang saya jalan itu mereka minta itu. Yang kapal ini kan sebetulnya sudah nelayan yang mapan yang menggunakan itu, tapi nelayan local disana kesian. Iya kita tidak ambil yang diatas tapi kalau bisa yang dibawah ini untuk menekan hal-hal yang negative tadi. Kalau bisa nanti di dalam penyusunan nanti sekali pun sudah ada gelondongan sini, tapi bisa dibantu untuk nelayan local tadi.

Saya kira itu dari LHK, semuanya saya kira sudah bagus tadi presentasinya secara pribadi dan secara sebagai dari Nasdem saya mengapresiasi untuk semuanya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Selanjutnya kami persilakan ke Pak Hasanuddin, eh maaf ke Pak Irwan Zulfikar, siap-siap Pak Hasanuddin.

F-PAN (M. IRWAN ZULFIKAR MATTEWAKANG):

Terima kasih Ketua.

***Bismillahirrohmaanirrohiem
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

**Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi IV yang saya banggakan,
Ibu, Bapak Menteri berserta jajarannya dan juga Dirut Bulog.**

Dalam kesempatan ini saya pikir saya tidak banyak yang saya ingin sampaikan Ketua, bahwa apa yang kita bahas hari ini tidak lepas dari pada evaluasi kita dari anggaran tahun lalu. Dan secara khusus saya menyoroti soal bagaimana anggaran yang turun ke Daerah di Bidang Perternakan, juga Perikanan ternyata banyak yang saya lihat agak sia-sia Pak Menteri, karena misalnya bantuan Perternakan itu dibagikan oleh Dinas ataupun Kepala Dinas seolah-olah itu bantuan dari Bupati. Karena mungkin Kepala Dinas ini adalah tim sukses, sehingga mereka membagikan seenaknya saja. Tapi juga yang saya perhatikan keberlanjutan dari pada usaha Pemerintah bagaimana supaya ini punya ada keberlanjutan dari pada usaha dari Pemerintah ini ternyata sia-sia, karena setahun berjalan itu biasa sudah tidak memproduksi lagi, tidak berkembang biak maksud saya Pak Menteri, sehingga setelah saya memperhatikan bahwa ternyata bantuan-bantuan itu tidak dikiwal. Makanya saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter Hermanto, bagaimana supaya tenaga-tenaga pendamping khususnya dibidang perternakan tergabung di forum komunikasi SMDWP ini supaya bisa dilanjutkan kontraknya Pak Menteri, karena dengan kehadiran termasuk dari PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) saya pikir ini akan sangat membantu program-program tersebut di daerah. Nah ini mungkin yang saya sangat perhatikan satu tahun terakhir ini karena saya juga cuman satu tahun, sehingga dalam satu tahun ini saya turun ke masyarakat saya betul-betul memperhatikan soal itu.

Termasuk juga yang kedua khusus kepada Pak Menteri, tolong kami dibantu untuk mengklarifikasi kepada daerah pemilihan kami, bahwasanya pada raker bulan Januari yang lalu bahwasanya ada aspirasi dari anggota Komisi IV akan diturunkan bulan Maret ternyata alhamdulillah sampai bulan September ini pun belum ada, katakanlah seperti asintan 155 unit, pompa air dan sebagainya. Ini sampai sekarang masyarakat di dapil itu masih menunggu, sampai periode kami ini akan segera berakhir ternyata apa yang kami janjikan itu belum ada, sehingga kami mohon bagaimana supaya kami bisa dibantu dengan mengkomunikasikan kepada Dinas-Dinas di daerah pemilihan kami.

Itu yang pertama, kemudian yang kedua juga khusus kepada KLHK.

Kami melihat memang anggaran Dirjen DAS ini dibutuhkan yang besar Bu, ini tidak lepas juga Bu bagaimana supaya perhatian anggaran untuk di Dirjen Gakum perlu ditingkatkan, karena melihat pengalaman bagaimana banjir badang yang terjadi di Sulawesi Selatan kemarin ini juga tidak lepas dari pada rendahnya SMD masyarakat atau mungkin karena factor kebutuhan masyarakat yang terdesak sehingga banyak dari masyarakat mereka ini yang berpikir pendek bagaimana untuk bisa menghasilkan kayu ataupun hasilnya untuk dijual, sehingga saya sangat berharap bahwa bagaimana supaya anggaran di Penegakan Hukum ini karena memang di SDM di daerah sana agak rendah sehingga ini mungkin perlu diberikan edukasi atau pun bagaimana diberikan pemahaman bagaimana apa yang anda lakukan selama ini bisa akan berdampak negative seperti apa yang terjadi di bulan Januari atau Februari 2019 lalu.

Itu saja mungkin Pak Menteri, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Selanjutnya Pak Hasanuddin, siap-siap Pak Fadholi.

F-PPP (HASANUDDIN):

Bismillahirrohmaanirrohiem

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan yang kami hormati,

Para Anggota Dewan yang berbahagia,

Bapak Ibu dari 3 Kementerian Menteri LHK, Menteri Pertanian, IBu Susi Kelautan dan Pak Buwas Bulog, dan rekan-rekan lain dari BRG, dari Berdikari, Pupuk dan lain sebagainya.

Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.

Khusus untuk Pak Menteri Pertanian, kami dialokasikan oleh Bupati Kabupaten Solok 200 hektar untuk penggemukan sapi, kami sudah bicara dengan Pak Dirjen Perternakan, mudah-mudahan anggaran 2020 ini bisa dialokasikan untuk sapi. Yang kedua kami sudah bercerita juga dengan Dirjen PSP dan Dirjen Tanaman Pangan, juga Dirjen Holtikultura bahwa tanah kita saat ini sudah kritis sekali, karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan termasuk pestisida yang diambang bates. Oleh karena itu

melalui Balitbank mungkin Pak Fazri mungkin nanti akan kami coba untuk meneliti lebih lanjut. Dalam penelitian itu sudah 80% lahan kita kritis, dari 7 juta sampai 10 juta hektar yang sekarang kita pakai, sehingga Bulog engga bisa lagi menyerap lebih banyak, karena memang yang sekarang kita sudah kritis.

Yang kedua juga kami menyarankan di anggaran berikut ini, saya sudah lihat tadi di Kementerian Pertanian itu 26, sekian triliun untuk subsidi pupuk, hanya 1,4 kalau tidak salah untuk organic. Kalau menurut hemat saya itu terlalu sedikit untuk organicnya tidak berimbang. Minimal untuk tahun 2020 ini cobalah sekitar 5 triliun. Jadi kalau 26 kurang 5 triliun, tarohlah 20 untuk anorganik, lebihnya untuk organic. Saya sama dengan Pak Hermato tadi ini tanggung jawab kita nanti di akhirat kalau ditanya sama Yang Maha Kuasa ke kita, kenapa lahan kita dibiarkan saja seperti itu tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Mungkin tahun ini tidak masalah ke kita, tapi sepuluh tahun yang akan datang, dua puluh tahun yang akan datang kalau ini kita biarkan tanpa merubah cara bertani kita dengan pola organic, berkemungkinan nanti sawah kita tinggal sejengkal saja. Dulu kami ingat waktu kami bertani sawah itu sepaha Pak, sekarang sedengkul, takutnya nanti segini, kenapa, karena keras, karena terlalu banyak pupuk kimiannya.

Oleh karena itu Pak Ketua kami di 2020 ini kita rubah cara berpikir kita untuk pertanian, kita kembali kepada alam, kepada hayati, ini permohonan kami dari Komisi IV. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa bersama-sama dengan Eselon I untuk bisa memikirkan ini.

Langkah yang biasa dilakukan untuk mengatasi apa yang saya sampaikan tadi adalah dengan menggunakan pupuk organic untuk mengganti penggunaan pupuk anorganik atau kimia pada tanah pertanian. Maksudnya adalah mungkin tidak bisa seperti kita membalikkan dua telapak tangan kita, tentu bertahap, tahap pertama itu di 2020 ini mungkin kami berharap nanti ketika ada rapat sekali lagi dengan Eselon I kita coba untuk berdiskusi lebih banjang lagi terhadap kesuburan lahan kita atau tanah kita.

Lanjut kepada BRG, mudah-mudahan BRG juga bisa sepakat dengan kami untuk menaikkan PH tanah yang ada di gambut yang sekarang 3 atau 4, 3 ya Pak ya, 3&4 bisa menjadi 5 atau 5, 6, 7 mempergunakan pupuk hayati. Mudah-mudahan pupuk hayati ini bisa menekan karbon juga ya Pak, nanti kita kalau karbon kita bisa juga dapat keuntungan dari sana ya Pak. Mudah-mudahan nanti BRG bersama dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup bisa menjaga itu semua dan kita coba, bukan tidak boleh pakai hidrolomit Pak, nah ini jangan sampai salah paham, bukan tidak boleh pakai hidrolomit, boleh saja tapi juga kita perhatikan, hidrolomit itu kan berat bawaannya susah untuk sampai kelahan. Kalau hayati ini satu hektar itu cukup dengan dua liter saja, kalau hidrolomit harus berapa ton Pak satu hektar Pak, berapa Pak, dua ton ya Pak, kan terlalu berat membawa apalagi jauh dari pada jalan. Ini luar biasa Pak kalau pakai hayati Pak, tapi hayati yang betul-betul hayati Pak, bukan Nurhayati gitu maksudnya.

Lanjut kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampah Bu ada technology baru Bu, sekarang Bu sampah itu tidak perlu dipisah, yang susah kan sampah itu dipisah mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang B3. Ada

technology baru tidak perlu dipisah langsung masuk dalam sebuah mesin, dia menjadi air bersih dan menjadi listrik. Di technology baru itu tidak perlu dipisah, nanti hanya mengeluarkan air bersih dan bisa mengeluarkan tenaga listrik. Mungkin nanti kita bisa berkoordinasi dengan tenaga ahli yang membidangin sampah ini Bu.

Lanjut kepada LHK, terima kasih Bu bantuan selama ini sudah kami terima, dan kami juga berharap berikutnya supaya perhutanan social khusus di daerah kami mohon dibantu untuk penanaman kayu putih, dan mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat disekitar hutan, sebagaimana Pak Hermanto sampaikan tadi mereka tetap miskin, mudah-mudahan dengan penanaman kayu putih ini mereka bisa berubah statusnya dari miskin ke tidak miskin.

Pada Ibu Susi terima kasih Bu di daerah kami keramba sama bagan sudah mulai hilang, dan itu sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan (suara kurang jelas) yang ada di Sumatera Barat, bahkan di danau Cikara itu sekarang sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi bagan, tidak ada lagi keramba. Tapi permohonan mereka tetap harus dibantu dengan alat tangkap yang kecilah tidak usah besar-besar, sehingga mereka bisa ke danau, bisa mendapatkan ikan lagi seperti yang lalu.

Pak Bulog mudah-mudahan diwaktu yang tidak lama ini kita kesana, mudah-mudahan Bulog bisa membeli beras solo dengan HPP yang sudah dirubah. Sekarang engga bisa Pak, mudah-mudahan nanti bisa dirubah, dan kita kerja sama dengan Pak Menteri Pertanian sudah kerja dengan Bulog disana Pak, kita akan demplot di Solo itu ada namanya bibit beras mati Pak, iya beras mati, pas mati tidak mengalahkan beras solo artinya, bisa tiga kali panen, panen pertama beras solo yang mahal, yang kedua beras mati tadi, yang ketiga ada paritas baru dari balitbank itu bisa 1 hektar itu 11 ton, jadi tidak mematikan beras solonya tetapi bisa juga mengisi kebutuhan Bulog, jadi 3 kali panen, panen pertama tetap beras solog, panen kedua beras mati tadi, yang ketiga saya tidak tau paritasnya dari balitbank itu bisa sampai 11 ton perhektar. Kita kerja sama dengan Bulog di Kabupaten untuk demplot dulu Pak, mudah-mudahan ini didukung semua, sehingga keberlangsungan pangan kita kedepan bisa teratasi.

Itu saja Pak Ketua, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita rapatkan kembali rapat berikutnya untuk kita masukan ke anggaran 2020.

Terima kasih.

***Wabillahi Taufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Pak Fadholi terakhir sajalah,
Ibu Felicitas.

FP-GERINDRA (Dr. FELICITAS TALLELEMBANG):

Terima kasih Pak Ketua.

Wakil Ketua, Bapak Menteri dan Ibu Menteri, Eselon I yang terhormat, juga yang sangat saya banggakan, Teman-teman dari Komisi IV yang saya hormati.

Saya mulai dari Kementerian Pertanian. Apresiasi saya sampaikan kepada Kementerian Pertanian untuk programnya yang selama 2 tahun saya disini saya lihat cukup membantu peningkatan ketahanan pangan di Indonesia, walaupun masih beberapa hal mungkin kedepan yang perlu diperbaiki. Khususnya untuk 2020 saya lihat disitu ada sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, bahwa akan memberikan pelatihan kepada petani-petani milenial, ini sangat saya apresiasi karena banyak pengangguran di desa Pak yang memang mungkin dia Bapak Ibu nya petani, tetapi karena dia sekolah sampai SMP bertani dia sudah lupa, cuman mungkin yang perlu diperhatikan Pak Menteri adalah, apakah setelah diberikan pelatihan pertanian atau dari Kementerian yang lain mungkin dia kembali akan bertani apakah ada lahan Bapak orang tuanya, kalau tidak mungkin ada kerja sama antar Kementerian Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten mencari lahan-lahan yang kosong untuk petani-petani yang telah diberikan pelatihan itu, dan tentu disertai dengan bibit-bibit yang mungkin menjadi dasar yang dia punya modal.

Yang kedua kepada Menteri Pertanian khususnya, memang pangan kita lihat meningkat tetapi kualitasnya mungkin yang harus perlu diperbaiki. Khususnya dari Bibit, bibit kadang-kadang petani mengeluh dibawah kami sudah menanam bibitnya datang, jadi kadang-kadang dia iya aja padahal yang dia tanam itu bibitnya sendiri, karena mungkin terlambat datang, jadi mungkin setiap daerah dinasnya itu memberikan waktu bahwa kami menanam bulan sekian supaya yang menyebarkan bibit kebawah membawa dengan tetap waktu.

Yang berikutnya adalah pembagian alat-alat pertanian, ini sangat membantu petani tetapi mungkin Pak Menteri kedepan diverifikasi yang mana yang membutuhkan alat a yang besar, yang mana b, yang mana c, supaya benar-benar akan menghasilkan produk yang membuat negara ini akan kedepan mengurangi dan kalau perlu tidak impor lagi, mohon maaf.

Yang berikutnya adalah penyuluh pertanian, dimana-mana penyuluh pertanian ini masih kurang Pak Menteri, biasa mereka satu penyuluh membawahi tiga desa, jadi bayangin saja ditaro sana ditaro sini, ada yang punya motor sendiri, ada yang sudah diberikan motor dinas.

Dan selanjutnya buat kepada Bulog, ada saran saya Pak Ketua dan tema-teman kepada Bulog ini mungkin, kita tau Bulog ini adalah tempat menyimpan peyangga dari bahan pangan yang ada di Indonesia supaya tidak terjadi kelangkaan pangan. Tetapi

saya lihat di lapangan penyimpanannya sangat miris, gudang-gudangnya mohon maaf Pak Direktur sudah perlu direnovasi Pak Ketua, mungkin anggaran Bulog ini bisa Pak Menteri bantu, apa mungkin kita tidak terlalu rugi membangun gudang-gudang baru yang bisa menyimpan sampai dengan ada kedap udara ya, jadi ada sudah kedap udara yang mana bisa dikasih keluar, yang mana yang masuk. Yang kedap udara itu kita bisa menyimpan sampai 10-20 tahun, kita lihat penyimpanan di Eropa kami pernah ke Turkiye 1 tahun lalu penyimpanan mereka sangat bagus, bisa menyimpan 10 tahun pangan di dalam tidak apa-apa dan sama juga akan saya sampaikan pada Kementerian Kelautan sebentar untuk penyimpanan. Mohon kedepan mungkin dianggarkan ini untuk kepentingan Negera kita tentunya dari pada bahan-bahan yang kita simpan di Bulog itu baru 6 bulan sudah jadi tepung, sudah berulat atau dan sebagainya, apalagi sudah satu tahun, buang-buang uang percuma.

Yang selanjutnya kepada Menteri Lingkungan Hidup, saya tidak banyak mengomentari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi ini saya hanya ingin menyampaikan. Dana yang ada di Lingkungan Hidup ini sangat kecil, tidak sepadan dengan apa yang mereka akan perlihar. Kita tau sendiri di Indonesia Lingkungan Hidup dengan Hutan, Laut dan Huta Gambut yang akan diperlihar, ini resikonya sangat besar belum lagi bagaimana penghijauan yang sudah hampir merata diseluruh Indonesia, kalau kita keliling itu hampir gundul dimana-mana, ini akan berimbas juga tentunya ke Kementerian yang lain dan juga Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia sendiri. Mohon Bu Menteri, siapa pun Menteri berikutnya, mohon diperhatikan itu barang kali. Lingkungan Hidup perlu bukan soal dana, ini memang dia butuh banyak dana, khusus untuk menghijaukan Indonesia dan menjaga Lingkungan Hidup yang ada di Indonesia.

Sedikit Bapak Menteri Pertanian tadi, mungkin seperti teman yang lain diseimbangkan antar pupuk kimia dan pupuk organic, pupuk kimia terlalu besar dan organiknya terlalu kecil mengakibatkan tadi teman-teman yang lain humus kita lama-lama hilang itu.

Dan yang paling terakhir itu adalah Kementerian Kelautan, Laut ini adalah Sumber Daya Alam kita yang merupakan salah satu yang terkaya di dunia Ibu Menteri tentu tau lebih mengerti soal itu, walaupun saya seorang dokter tapi saya sedikit mengerti, saya pernah menjadi kepala Puskesmas dan Kepala PKK. Cuman yang ingin saya sampaikan memang sedikit sekali anggaran Ibu, akibatnya apakah itu bisa membantu petani nelayan-nelayan yang miskin itu di daerah, mudah-mudahan bisa Bu. Tetapi mohon kiranya diperhatikan nelayan-nelayan kecil yang cuman butuh perahu kecil yang tadi teman saya dari Padang sudah sampaikan, mereka butuh itu alat untuk mancing di laut Ibu Menteri, itu mereka hidup senin, kamis ya, di daerah suami saya itu daerah sinjay, dan daerah kesana itu takalar, jeni ponto, kebanyakan mereka melaut memakai perahu kayu, mungkin kedepan Ibu Menteri bisa dipikirkan pengadaan kapal-kapal ini disesuaikan dengan daerahnya dan ombak di daerah masing-masing, karena kalau sama rata semuanya saya tidak bayangkan, ada yang memang tidak bisa memakai itu akhirnya kita membuang uang-uang saja. Dan khususnya untuk saya apresiasi kepada Kementerian Perikanan dalam perusahaan negara yang telah dibuat

untuk mengeksport ikan tuna keluar negeri apa namanya saya lupa, saya disini cuman sedikit memberi tanggapan kepada penyimpanannya Ibu Menteri. Penyimpanan lagi, berapa banyak pun kita tangkap kalau penyimpanan dari ikan-ikan ini tidak sesuai dengan standar Ibu lebih tau pasti sangat lebih tau dan dengan standar penyimpanan nasional ikannya akan dijual tidak ada harganya, kami pernah kunjungi di Bali dan lainnya. Mudah-mudahan diperbaiki penyimpanannya, gak jelas mana dibawa mana yang baru datang, mana yang sudah datang, tulisan-tulisannya disitu mana yang sudah masuk apa berapa masuk, apa yang berapa keluar. Jadi ini mungkin catatan Ibu Menteri semoga Kementerian Perikanan ini menjadi salah satu Kementerian juga yang memberikan devisa yang paling besar buat Indonesia, ini adalah penghasil yang terbaik Indonesia dan lebih mampu Kementerian Perikanan untuk mengelolanya, terutama khususnya yang dikelola sendiri oleh bangsa dan negara ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Felicitas.
Saya persilakan Bapak Umar Arsal.

FP-DEMOKRAT (UMAR ARSAL):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati, dan Mitra Komisi IV.

Ini hari cukup ramai, ini kalau tidak salah ini 10 Muharrom, eh 9 Muharrom, ini bersejarah karena mungkin ini rapat kerja formal kita yang terakhir untuk periode ini. Dan mungkin saja diantara Pimpinan ini ada yang beralih fungsi duduk dihadapan Pak Menteri, yang pasti di depan ini belum tentu ada yang duduk di DPR karena sudah lewat dan kita do'akan teman-teman pun yang belum terpilih mungkin ada yang jadi Gubernur ada yang menjadi Menteri, dan diantara Pimpinan 5 ini saya perkirakan ada dua yang menjadi Menteri, mudah-mudahan ya.

Jadi kita sebagai saksi, mudah-mudahan di ruangan ini adalah pertemuan formal yang terakhir bagi kita, tapi yang seterusnya hubungan jabatan bisa berakhir tapi silaturahmi harus jalan terus, jabatan semua punya masa, tapi persahabatan tidak mengenal masa, itu yang perlu. Dan soal janji-janji kami, baik teman-teman yang terpilih maupun tidak terpilih tetap dituntun oleh rakyat. Mohon 3 Kementerian ini memperhatikan, kalau teman-teman yang terpilih masih bisa mengawal, tapi teman-teman yang tidak terpilih mohon karena sudah menjanjikan ke rakyat tolong realisasi 2019 itu mohon atas nama teman-teman yang tidak terpilih tolong juga dipikirkan, dan

saya titip sama teman-teman yang terpilih untuyk mengawal, itu pun dengan catatan kalau Bapak masih di Komisi IV, dan mungkin saja diantara Menteri-Menteri ini ada yang terpilih tapi belum tentu ada di Komisi IV. Sebenarnya ini memang betul-betul taruh, ini pertemuan formal yang terakhir, dan mungkin kita nanti ada pertemuan lagi tapi dengan Eselon I.

Terkait, tadi saya sudah bicara soal aspirasi teman-teman, mohon 3 Kementerian memperhatikan janji-janji yang kami dimasyarakat tolong bisa dipenuhi. Dan terkait teman juga tadi sudah menyinggung masalah tenaga penyuluh atau pendamping, saya melihat ada permasalahan dari tenaga penyuluh kita, kadang kala petani lebih pintar dari pada penyuluh, begitu juga nelayan petani. Mohon kedepan betul-betul anggaran untuk pelatihan-pelatihan penyuluh dan pendamping ini betul-betul ditingkatkan, supaya jangan malah petani yang lebih pintar, atau nelayan yang lebih pintar dari penyuluh. Ini saya lihat problem di lapangan, mohon ini betul-betul untuk diperhatikan untuk kedepan.

Soal terkait dengan Kehutanan saya melihat dengan dana 9 triliun ini sangat tidak memadai, apalagi terkait dengan program pengendalian DAS dan hutan lindung, maupun program konservasi Sumber Daya Alam. Kita tau Taman Nasional kita ini terbesar di dunia ini luar biasa tapi anggarannya hanya 2 triliun, mudah-mudahan kedepan teman-teman Banggar ini memperhatikan. Kita ini daerah yang sangat luas dan hutangnya sangat luar biasa, mohon kedepan ini dipikirkan anggaran atau untuk alokasi anggaran.

Dan terkait dengan Pertanian, saya bangga peningkatkan ekspor untuk komoditi tertentu luar biasa peningkatannya cuman mohon koreorasinya terukur dengan kesejahteraan para nelayan, jangan kita terpaku peningkattan berkali lipat, tapi yang mendapatkan itu pengusaha-pengusaha besar tapi rakyat kecil tidak terukur, makanya mohon kedepan. Dan saya bangga terus terang Pemerintahan sekarang ini sangat tertolong oleh sector pertanian dengan kerja keras Pak Amran ini sangat luar biasa, Menteri siapa pun nanti ini hanya tinggal melanjutkan. Dan mudah-mudahan, tapi titipan saya peningkatan ekspor ini harus koreorasinya dengan kesejahteraan petani harus betul-betul terukur.

Dan terkait dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, mohon Ibu kedepan juga mohon dipantau bantuan-bantuan, alat tangkap kapal. Saya kadang-kadang sedih di saya sebagai anggota Komisi IV beberapa Pemerintah Daerah menyerahkan bantuan tanpa pernah memberitahukan kita disaat penyerahan, iya mestinya Dirjen Bapak atau Sekjen kordinasi kalau ada penyerahan-penyerahan bantuan hormatilah seperti yang dilakukan Menteri Pertanian, walaupun kita terhormat juga datang disaksikan oleh rakyat menyerahkan atau pun kita hadir. Ini beberapa Bupati penyerahan kapal-kapal di Sulawesi Tenggara tidak pernah kami diundang, jadi teman-teman pada kelompok lain nanya, Bapak ini di Komisi IV apa peranannya, ini kok Bupati tidak ada urusan dengan Bapak gitu. Mohon kedepan ini yang seperti ini jangan lagi terjadi seperti itu.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Umar luar biasa.

Saya persilakan Pak Fadholi, siap-siap Pak Erislan.

FP-NASDEM (Drs. FADHOLI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak, Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati, Bapak dan Ibu Menteri yang sangat saya hormati, dan seluruh jajaran Eselon yang hadir pada kesempatan hari ini, baik dari Bulog maupun dari Pupuk dan lain-lain.

Yang pertama menyampaikan Selamat Tahun Baru Hijriah, mudah-mudahan kita senan tiasa dalam perlindungan Tuhan aamiin. Yang kedua pada pengujung masa bakti Pemerintah Pak Jokowi yang pertama ini merupakan satu hal yang bagus, tentu kita sudah sama-sama tau bukan sekedar membaca dan mendengarkan apa yang tadi menjadi suatu paparan oleh para Menteri, tetapi kita sebagai Komisi IV yang sudah sama-sama menjadi mitra, kita sudah sama-sama tau dan bisa mengerti sepenuhnya. Dan mudah-mudahan kerja sama ini bisa membuahkan suatu hikmah dan membawa barokah. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena yang kedepannya mudah-mudahan masih senantiasa bisa bersama. Kita masih berharap semua Menteri ini bisa menjadi Menteri lagi, aamiin.

Pada hari ini kita membahas masalah anggaran dan prinsipnya kami dari fraksi partai Nasdem menyampaikan bahwa kami bisa menerima anggaran yang telah diajukan oleh ke-3 Menteri ini, dengan satu catatan bahwa nanti kita akan melakukan satu pendalaman agar bersama-sama untuk bisa lebih menindak lanjuti, karena anggaran itu akan bisa bermakna kalau nanti sudah ada penajaman yang lebih lanjut. Anggaran bisa bermakna kalau nanti ada suatu program-program yang tepat guna dan bermanfaat untuk kemasyarakatan.

Sebetulnya kita sudah 5 tahun bermitra Pak, iya jadi tidak perlu lagi apa yang harus kita bicarakan hanya persoalannya saat sekarang inikan kita sudah tau masing-masing, mana yang memang kurang baik, mana yang memang sudah baik, yang kurang baik harus kita perbaiki, tak ada gading yang tak teretak, kita akan menerima semua dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tidak ada yang sempurna itu menjadi catatan kita. Tetapi ketika kita membahas hal-hal yang kurang, ini adalah suatu hal yang wajar, kalau yang baik ini tentu kita sampaikan kepada masyarakat yang lebih

luas, tapi kalau ada hal-hal yang kurang sedikit memang ini yang harus kita bahas diforum ini.

Nah oleh karena ini saya hanya sedikit mensinyalir saja Pak, jadi jangan sampai, catatan saya hanya sedikit ketika ada Pimpinan kami menyampaikan segemgang proposal tapi sampai sekarang tidak ada yang realisasi, ini saya sedih sekali. Nah ini saya, Pak Roemkono pernah menyampaikan proposal yang begitu banyak ya Pak ya, dan di depan ini, di depan rapat ini hal-hal yang semacam itu seharusnya jangan sampai itu terulang lagi. Saya yakin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi, bahwa program-program yang kita sampaikan ke masyarakat itu sama kitanya sebagai sama-sama karyawan, nah pada intinya bahwa kita perlu pendalaman lagi untuk lebih mempertajam lagi, mana yang memang perlu untuk kita bisa anggarkan kembali, dan mana yang tidak kita anggarkan kembali. Kalau itemnya untuk bisa kita sampaikan disini saya pikir tidak cukup, karena ini ada tiga Kementerian dan kemarin sudah kita bahas, kita sudah membahas dengan masing-masing Eselon I, baik dari Kementerian Lingkungan, dari Kementerian Pertanian, maupun dari Kementerian Kelautan, dan itu yang kita tunggu sebetulnya tindak lanjutnya bahwa hal-hal yang kemarin sudah kita bahas itu ini yang perlu kita sampaikan, nah itu nantinya yang akan kita bahas kembali.

Jadi pada prinsipnya Pak Ketua rapat ini saya mengusulkan bahwa pagu anggaran yang diajukan ini pada prinsipnya kami bisa menerima untuk bisa dari pagu ini dengan catatan bahwa nanti kita akan adakan satu pendalaman lagi, untuk bisa lebih memperinci karena selama 5 tahun ini kita masing-masing sudah punya catatan, mana yang perlu dibidang pertanian, mana yang lebih urgent kita sudah sampaikan, ada beberapa hal yang urgent tetapi ada yang lebih urgent lagi, baik dari sarana prasana maupun program-program yang lainnya, kalau ini kita bedah cukup banyak seperti yang saya sampaikan adalah yang sangat diperlukan saat sekarang ini adalah perbaikan infrastruktur di sector pertanian, ini menjadi satu bagian yang sangat penting sekali. Kebutuhan air menjadi suatu hal-hal yang dasar, ini nanti pasti akan kita jabarkan kedalam suatu rapat-rapat di Eselon dengan Eselon I. Maka saya sepakat tadi apa yang disampaikan tadi Ibu Susi untuk bisa meminta agar semua Eselon I untuk bisa korodinasi dengan kami, kami sangat berterima kasih sekali dan akan kita tindak lanjuti bersama-sama. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa jangan sampai kami menyampaikan beberapa hal ini termasuk di Kementerian Kelautan ini, ada beberapa usulan yang kita sampaikan tapi ternyata bahwa proposal yang disampaikan kita tanyakan bahwa proposalnya itu keterlinsut atau bagaimana, ini kita susah sekali ini, jadi keterlinsutnya bukan dikita tapi ada di Kementerian, kan ini kita jadi susah sekali kalau ini-ini, padahal kita itu mitra bersama-sama. Nah jangan sampai ini terulang kembali, iya Pak ada Bu, nanti kalau saya sampaikan engga enak, ini kalau saya buka bisa saja saya buka tapi kan engga enak. Ini salah satu catatannya begitu, kita akan bersama-sama. Kami menerima dan memberikan suatu penghargaan semua kerja Menteri itu adalah baik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kita berdo'a mudah-mudahan beliau-beliau ini besok bisa diperpanjang lagi menjadi Menteri ya.

Demikian yang saya sampaikan.

AkhirulKalam

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fadholi.

Itu suara Komisi IV Pak, jadi ini saya kira itu curhat Pak, karena kalau Eselon I itu sudah biasa mendengar keluhan-keluhan ya, ini curhat kepada Menteri, begitu ya.

Saya persilakan kepada Pak Erislan, dan siap-siap kepada Yus Sudarso.

Saya kira ini yang terakhir ya, karena kita nanti masih ada pendalaman yang hilgtnya saja, substansial, yang umum-umum yang bisa ditanyakan langsung kepada Menteri, kalau teknisnya kita nanti pendalaman.

FP-HANURA (ERISLAN, ST., MM):

Baik terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Menteri dan Bapak Kepala Bulog Pak Buwas.

Sebagai Anggota DPR tentunya saya harus menyampaikan apa yang saya tau, demi kebaikan masyarakat. Secara umum saja saya ingin mengingatkan bahwa inikan bicara program kerja dan anggaran yang outputnya adalah kesejahteraan rakyat, nah bagaimana mengukur kinerjanya itu, dari banyak referensi dan teori yang saya pelajari ada dua cara menilai output dari sebuah kinerja, pertama dari sisi finansial, dan dari sisi non finansial. Bicara Kementerian dan Kelembagaan maka tidak cukup hanya diukur dari sisi finansial karena kita tidak mencari untung, berbeda dengan BUMN itu kita mencari untung. Makanya KL (Kementerian Lembaga) mengukur dari sisi WTP, laporan-laporan keuangan BPK itu tidak akan tercapai output dari program ini yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Saya juga sampaikan kemarin ketika saya diperbantukan BPK, kalau BPK itu hanya menilai laporan keuangan engga kinerja, maka ganti saja namanya Badan Pemeriksa Laporan Keuangan, tapi disitu di Undang-Undang dijelaskan bahwa BPK tanggung jawabnya adalah pengelolah keuangan negara, pengelolah ini semuanya dari mulai perencanaan sampai dengan out putnya masyarakat, sampai kembali kepada dua variable tadi bicara tentang finansial dan non finansial. Finansial jelas ukurnya bahwa dia melihat dari sisi laporan keuangan, penyerapan anggaran. Kemudian kita engga fair kalau misalnya Kementerian Lembaga hanya berfokus kepada finansial laporan-laporan WTP dari BPK, yang saya inginkan lebih penting dari itu yang lebih kursial bagi kemasyarakatan Indonesia KL ini dari sisi finansial, karena Kementerian Lembaga ini adalah Lembaga layanan public, dia tidak mencari keuntungan, ujung dari Kementerian Lembaga ini adalah bagaimana kesejahteraan rakyat, dari sisi pelayanan tentunya bagaimana rantai panjang dari

proses perizinan ini makin diperpendek. Pak Jokowi kemarin sampaikan hati-hati beberapa investor dari asing sudah pindah ke Vietnam dan Thailand mekera disana cuman 3 bulan selesai pindah, kalau di Indonesia bertahun-tahun, itu maksudnya dari pelayanan public yang ujungnya bicara tentang tata kelola, transparan, akun table dan efisien dan efektif, ujungnya itu. Jadi program yang Bapak buat dengan uang negara ujungnya itu, bagaimana menghasilkan tata kelola yang berkualitas, efektif, efisien, akun table dan transparan yang memotong rantai panjang izin perizinan itu. Satu, yang kedua. Bagaimana memotong rantai suplay izin yang terlalu panjang ini. Banyak contoh-contoh bantuan ini tidak sampai langsung kepada masyarakat tapi lewat calo-calo. Ini adalah bentuk kinerja dari proses yang namanya layanan public. Selanjutnya bahwa setiap program dari sisi finansial lagi, setiap program yang Bapak buat apa pun itu akan menjadi sebuah yang bernilai kesejahteraan ketika ujungnya program itu ditujukan untuk membantu pengentasan kemiskinan, petani yang tadinya miskin bisa jadi baik, ya semuanya nanti, nelayan yang tadinya miskin jadi lebih baik lagi. Nah semuanya itulah yang dimaksud dengan tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Saya kembali contoh kebicara yang lebih agak spesifik dari latar belakang fikiran tadi. Saya contohkan begini, saya informasi di lapangan semenjak Pak Buwas jadi Kepala Bulog itu semakin baik itu katanya, dulu ya banyak pemain-pemain karena harganya ditekan ya beras itu dicampur di gudang Pak Buwas, dengan beras yang utuh dengan beras yang sudah pecah-pecah, sekarang semenjak ada Pak Buwas disidak mendadak semua pemain-pemain bangkrut, itu bagus Pak, cuman ya namanya tadi Pak ya kalau bisa nanti langsung beli dari petani gitu loh Pak, jadi itu yang dimaksud dengan bagaiman cara memotong rantai suplaycin, jadi tidak mengasih modal kepada pemilik pabrik atau apa. Nah contohnya, bicara nah ini kaitannya dengan Kementerian Pertanian Pak, ternyata Petani itu Pak Buwas menanam padi itu mereka mengutang dari tengkulak sehingga nanti ketika panen mereka sudah menyerahkan harga itu kepada tengkulak, akhirnya ditekan dengan oleh tengkulak sehingga petani itu dibayar dengan harga yang sangat murah. Nah kemana disitu fungsi Dirjen tanaman pangan yang bertugas untuk menyebarkan bibit-bibit. Nah selain masalah-masalah itu banyak yang harus kita benahi suplaycin, makanya kemarin saya sampaikan di rapat, bahwa daya saing itu ada dua orientasi disitu pertama, daya saing itu penguatan daya saing itu untuk bisa sebuah negara pertama disrtorsisnya sudah sangat baik, yang kedua market oriented. Jadi resort oriented dan market oriented. Disrtor oriented itu bicara suplay cin bagaimana distribusi program-program bibit-bibit, pembelian hasil-hasil tani dari petani langsung, itukan bagian dari suplaycin.

Nah kemudian contoh lagi di KPP, memang KPP semenjak ada Bu Susi banyak perbaikan yang sudah dilakukan, perizinannya yang tadinya masih manual sudah menggunakan technology informasi, saya juga sangat apresiasi hal tersebut. Karena kalau kita bicara selalu menjawab permasalahan bahwa kekurangan ESDM itu sangat tidak fair bagi saya, berapa banyak ESDM yang bisa yang akan kita butuhkan untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia kalau bicara ESDM, dan itu masalah klasik, yang bisa mengatasi itu adalah technology informasi. Nah Ibu sudah membuat perizinan menggunakan technology informasi, ya cuman memang dalam proses

mungkin transformasi konvensional ke teknologi ini mungkin ada kekurangan yang harus dibenahi, mungkin masih ada keterlambatan-keterlambatan proses yang belum automaticly. Jadi begini, yang namanya system informasi manajemen itu adalah system pengambilan keputusan. Jadi jangan salah bahwa ada system informasi itu yang hanya menampilkan informasi hanya menampilkan data ya, kalau butuh data jumlah petani, atau jumlah izin yang masuk KPP berapa izin. Tapi ketika bicara system pengambilan keputusan, maka ketika ada izin yang masuk yang mengurus izin lewat technology informasi lewat online maka setiap ada penolakan dia akan dilaporkan kepada si yang mengurus bahwa ada kekurangannya berkas ini-ini melalui sms seperti yang ada di technology perbankan ya kalau ada uang masuk keluar masuk. Nah itu pengambilan keputusan, begitu juga kepada Pimpinan Menteri bahwa ketika ada izin yang harus ditanda tangani langsung dilaporkan kepada handphonenya Bu Menteri, nah itu artinya dia langsung mengambil keputusan kepada siapa informasi itu harus diberikan atau disebarakan sehingga itu menjadi sebuah alat untuk mengambil keputusan, jadi hanya bukan sekedar menampilkan informasi, itu bicara technology informasi. Nah saya pelajari banyak system informasi yang ada di Indonesia hanya sebatas menampilkan informasi Pak.

Baik Pak, nah jadi ini yang hanya harus nanti diperbaiki-perbaiki lagi kedepan. Intinya saya mengapresiasi Pak Pimpinan kinerja semua Menteri yang ada, saya hanya berusaha saling mengingatkan dan menyapaikan aspirasi masyarakat, tolong programnya itu harus berujung kepada pelayan public baik, yang tata kelola yang namanya istilahnya good government itu tadi. Kemudian yang kedua ujungnya demi semata-mata program itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, terima kasih atas waktunya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Bapak Ibu sekalian,

Masih ada satu penanya Pak Yus Sudarso.

Mungkin masih ada tambahan, saya pikir cukup ya Pak Yus Sudarso nanti teknisnya. Tadi kita sudah sepakat sebenarnya ya kita bicara tentang teknis tentang keuangan saja, nanti mana yang perlu lebih teknis lagi kita ada forum pendalaman menggunakan rapat dengar pendapat bersama Eselon I. Jadi saya pikir ditempat ini hal-hal garis besar nanti pendalamannya ada tempat sendiri.

Kami persilakan Pak Yus.

FPG (YUS SUDARSO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pimpinan dan Anggota yang kami banggakan,
Bapak dan Ibu Menteri beserta jajaran yang kami hormati.**

Singkat saja karena memang sudah waktu siang, saya ingin mengambil satu isu dan cukup juga dari satu Kementerian. Sebaik-baiknya persoalan itu yang ditengah-tengah maka dari Bapak Ibu Menteri saya dan Pak Kabulog saya mengambil isu yang ditengah saja di Kementerian Pertanian.

Saat bulan Maret pada saat kita reses di Dapil Madura para Petani mengeluhkan persoalan harga jagung, dan kami tau bahwa Pak Menteri dengan para Dirjen cukup giat bagaimana meningkatkan program produksi jagung. Akan tetapi ada para doks, disatu sisi petani jagung mengeluhkan karena harga panen jagung turun, tetapi disisi lain di Jakarta di depan istana para peternak unggas ayam demo karena harga pakan naik, ini tidak ketemu hukum ekonominya. Pimpinan sampaikan persoalan ini ditanyakan kepada kalau seandainya Adam Smith hidup kembali maka Bapak ekonomi di dunia ini belum mampu menjelaskan, karena biasanya setiap satu komoditi itu akan naik karena bagian dari komponen bahan bakunya naik. Sementara ini adalah paradok harga para petani jagung turun, sementara harga pakan ternak naik. Lalu pertanyaan sederhananya kalau sedemikian maka kapan kehidupan petani kita akan sejahtera. Mungkin ini adalah bagian dari kasus kecil yang mungkin kita bisa berikan perhatian.

Demikian Pimpinan saya mengambil isu dari pengawasan, karena dari semua anggaran sudah banyak diperbincangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya dari meja Pimpinan masih ada Pak Michael Wattimena yang tadi baru sempat bicara sama Ibu Susi, mungkin sama Pak Amran sama Bu Siti juga perlu berkomunikasi dan Pak Buwas.

Kami persilakan.

FP-DEMOKRAT (Dr. MICHAEL WATTIMENA SE.MM) WAKIL KETUA:

Terima kasih Pak Edhy Pimpinan kami yang sangat arif dan bijaksana, dan juga sangat cakap.

Pak Menteri Pertanian, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Menteri KKP, Pak Dirut Bulog, serta semua jajaran yang kami hormati, kami banggakan, dan kami kasihi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang pertama kebetulan kami 8 tahun itu sebagai Pimpinan di Komisi V DPD RI, kami baru 2 tahun di Komisi IV. Dan awalnya kami berfikir bahwa best line sebagaimana disampaikan oleh Pak Hermanto tadi, itu adalah sesuatu yang bagi kami cukup luar biasa karena seingat kami waktu di Komisi V itu anggaran 2014 masa transisi ke 2015 seingat kami itu PUPR itu sekitar 80 triliun, sementara untuk perhubungan itu sekitar 40-an triliun. Tetapi pada saat kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama itu terjadi pencabutan subsidi, dan akibat dari pencabutan subsidi maka terkoreksilah anggaran 2014 pada APBN perubahan yang dipercepat dibulan Februari, sehingga PUPR waktu itu dari sekitar 70-80 menjadi 114, sementara yang di perhubungan dari 40-an menjadi 60-an triliun. Saya punya fikiran seperti itu awalnya, padahal saya coba komunikasi dengan Pak Ketua tadi bahwa memang best line itu tidak terjadi penambahan pada Kementerian, sebab Komisi IV yang merupakan Mitra kerja Komisi IV. Jadi rupanya awalnya itu sudah tinggi, tetapi yang terjadi saat ini kecenderungan tendensinya itu menurun dan menurun, dan ironisnya itu penurunan itu semua, tetapi yang mendapat apresiasi itu hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang setiap tahun terjadi peningkatan, padahal dari Kementerian Pertanian yang tadi banyak sekali teman-teman memberikan apresiasi itu pun juga tidak sebanding anggarannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian, semestinya Ibu Susi pun sama. Tetapi dari 13 triliun 2014 turun sampai dengan 5 dan 6 triliun saat ini. Ini kondisi yang apakah kedepan dengan anggaran dalam proses transisi ini, kecuali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa menjawab program-program yang kita lahirkan pada saat ini dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik itu nama efisiensi atau efektivitas, apakah ini bisa dapat dan membunikan terhadap ketahanan pangan kita dan bagaimana Kementerian bisa bekerja secara optimal.

Saya punya satu pertanyaan kepada Pak Menteri Pertanian. Saya dengar akhir-akhir ini katanya irigrasi, itu akan ditangani oleh Kementerian PUPR dengan jumlah anggarannya 117 triliun itu pada semua layer baik itu primer, skunder, dan tersier, apakah itu benar? Seperti itu nanti bisa disampaikan supaya kami juga paham karena beberapa kali kami ditanyakan itu, karena bagi kami kalau memang itu benar maka ini

jugakan kasusnya seperti beberapa beban yang saat ini diberikan Bapak Presiden kepada pembangunan-pembangunan fisik baik itu sekolah maupun juga yang lain-lainnya yang sifatnya fisik itu diserahkan kepada Kementerian PUPR. Apakah irigrasi ini juga hal yang sama itu akan diberikan kepada Kementerian PUPR? Kami sepakat dengan teman-teman sekalian terkait dengan Pak Dirut Bulog, kita saat ini semuanya bersuara lantang, kalau bisa rastra itu bagian dari pada tugas dan tanggung jawab kedepan yang akan dilakukan oleh Bulog, dan kalau ini masih diserahkan kepada teman-teman Kementerian yang lain maka ini akan mendapatkan kesulitan, sementara instrument dari pada Bulog itu cukup lengkap dengan melibatkan teman-teman kepolisian juga yang saat ini menjadi kemitraan dari pada Bulog.

Yang berikut, kebutuhan ini Ibu Susi lagi diluar ya?

Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian KPP, nanti Pak Sekjen tolong sampaikan kepada Ibu Susi, karena waktu kami kunjungan Komisi IV DPP RI dalam masa reses itu juga salah satu objek kunjungan kami adalah di Maluku, dan waktu itu sebenarnya luar biasa pada saat kami kunjungan kesana dengan Ibu Kepala Badan Karantina Ibu Rina, terima kasih Ibu, karena pada saat kami kunjungan kesana itu kejadian yang luar biasa dimana Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Perikanan dan Kelautan itu melakukan sebuah agenda yang luar biasa. Yang pertama yaitu, kita melakukan ekspor kepiting jumbo dari Bandara Udara Patimura Ambon itu ke Singapore. Yang kedua yaitu, kebutuhan Ibu Menteri sudah, iya saya dapat memahami Ibu karena yang Ibu lakukan itu tidak bisa dapat diwakilkan oleh yang lain ya. Iya jadi bagi kami Ibu Menteri, apa yang kami lakukan kemarin, kami ulangin lagi bahwa pada saat reses bulan Juli kemarin itu ada sesuatu yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Maluku, pada saat itu Kementerian diwakili oleh Ibu Rina sebagai Kepala Karantina, kenapa, karena disana kita melakukan dua hal, yang pertama itu ada yang namanya ekspor Kepiting Jumbo yang dari Raou itu ke Singapura melalui Bandara Patimura Ambon, yang kedua itu juga pada hari yang sama melakukan ekspor ikan tuna sirip kuning itu ke Thailand waktu itu kita sama-sama dengan Ibu Rina sebagai kepala Karantina. Jadi sebenarnya banyak hal juga yang mudah dilakukan oleh Kementerian KKP di Maluku. Tapi satu hal yang kami mungkin mau menyampaikan kepada Ibu sejumlah ratusan kapal, 1600-an yang beroperasi di Arou sana yang datangnya dari Laut Jawa, kalau bisa diberdayakan itu masyarakat setempat yang ada disana. Kami pernah dengan Pak Sulkifar itu melakukan kunjungan ke Arou waktu itu, memang komplek dari pada masyarakat setempat waktu satu tahun yang lalu itu juga sama dengan apa yang dikomplek oleh Pemerintah Daerah saat ini, kalau bisa diberdayakan masyarakat yang ada disana.

Mungkin itu saja beberapa hal yang kami sampaikan, dan dalam kaitan dengan RDP dengan Eselon I Ibu yang kemarin belum tuntas juga belum masuk dalam penjelasan, karena teman-teman semua kebutuhan saya yang memimpin RDP itu ditugaskan oleh Pak Ketua untuk memimpin kepada Kementerian Kelautan dan

Perikanan diminta kalau bisa ada hal-hal yang belum bisa dapat dijelaskan dan disampaikan oleh para Anggota yang butuh penjelasan dan kepastian dari Ibu, takutnya teman-teman Eselon I sudah memberikan kepastian tetapi pada saat komunikasi dengan Ibu ini jadi mental, sehingga teman-teman mengharapkan kalau bisa ini bisa dapat kepastian yang janji-janji yang belum dapat ditepati ini mungkin bisa dapat direalisasi.

Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Menteri Kehutanan, kita rasa-rasanya semuanya selama ini semuanya terbangun dengan baik.

Mungkin itu saja Pak Ketua yang bisa dapat kami sampaikan, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Terima kasih Pak Michael.

Saya hanya mau menambahkan tiga hal saja yang belum disinggung oleh teman-teman tentang penganggaran ini.

1. Saya mengucapkan terima kasih atas keseriusan Bapak Ibu Kementerian dalam hal tetap mempertahankan kontrak-kontrak yang ada di Kementerian masing-masing, baik KPP, Pertanian, maupun KLHK. Karena ini penting, pada saat negara kita sedang kesulitan jangan lagi kita menambah pengangguran baru. Di KKP mempertahankan sampai sekarang saya lihat di 2020, mudah-mudahan terus, tentang penyuluh perikanan bantu masih terus dipertahankan, kemudian diperhutanan juga, dan kami harap juga dipertanian tadi ada usulan juga dari teman-teman wirausaha ini juga menjadi catatan, kalau kita belum bisa mengangkat menjadi pegawai negeri setidaknya-inilah harapan yang mereka harapkan untuk selama kontraknya, sehingga dalam penganggaran 2020 kami harapkan ini kalau kita belum mengangkat sebagai karyawan tetap atau sebagai PNS kita bisa pertahankan sebagai kontrak dulu, sehingga pada waktunya nanti begitu manakala anggaran kita siap ini bisa kita angkat.
2. Yang selanjutnya, tadi yang disampaikan Pak Michael saya coba menghighlight saja hanya untuk jangan sampai komunikasi antara Eselon I kepada anggota oke, nanti tau-tau di Pak Menteri atau Bu Menterinya malah seolah-olah tidak dapat izin Eselon I-nya. Nah ini di KKP sebagai misal bantuan-bantuan keramba jarring apung, bantuan-bantuna kapal dan lain sebagainya, kami juga tau mungkin ada hal-hal funder yang belum selesai, kami juga mungki memahami ada syarat-syarat yang sudah dibahas tapi mungkin syarat itu masih ada kekurangan atau kelompoknya tidak memenuhi mungkin juga bisa diganti

dengan kelompok-kelompok lain yang tentunya tidak menyalahi aturan. Intinya adalah semangat Komisi IV DPR RI ini ingin membantu program Pemerintah yang selama ini kita bahas bersama-sama untuk sampai penyerapannya keorang menerima yang sebenar-benarnya.

3. Saya minta Bulog, saya yakin dalam kondisi sekarang dua tahun ini saya pikir Bulog mendapatkan suatu musibah besar dimana raskin berubah menjadi, BL, apa rastra diubah menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan yang kami sayangkan bantuan ini justru tidak diwajibkan atau tidak mewajibkan Bulog sebagai penyelenggaranya, padahalkan tinggal merubah saja kepada Bulog, kenapa tidak Bulog, sementara Bulog harus bersaing dengan pasar besar yang sebenarnya pasar ini ada keptifs, ini manfaatnya buat Pertanian, buat program yang hari ini kita bahas adalah mengaja kemampuan Pemerintah, menjaga pasar beras di petani itu sendiri. Sebenarnya kalau Bulog justru kalau anggaran 19, 21 triliun ya Pak kira-kira, 21 triliun ini masih dikuasai Bulog dengan sendirinya Pemerintah punya control langsung pada produktivitas beras nasional, dengan 16 triliun kurang lebih dikurangi dikembalikan ke pasar besar dimana orang penerima BPNT bisa melakukan akses beli di pasar mana saja tanpa harus di Bulog, otomatis pangan Pemerintah yang satunya hilang.

Nah saat ini kami minta, saya yakin semua Komisi IV sepakat ini menjadi catatan kita, dan alhamdulillah saya dengar dari Pemerintah sudah BPNT diwajibkan penyelenggaranya Bulog, nah ini ada satu kemajuan dan mohon ini terus di dorong, teman-teman Bangsa mohon juga nanti di Banggar diperjuangkan bahwa Bulog ini dengan anggaran 21 triliun yang dikelola ini sebenarnya masih sangat kurang. Catatan tadi yang disampaikan Direktur utama itu sebenarnya itu sebenarnya dicari sendiri bukan dari uang negara, kita harus bersaing dengan swasta maka kala dapat penugasan dari negara, tapi kita harus pinjaman sendiri. Saya yakin tidak adil buat kita disini. Makanya kita sama-sama dalam kesempatan ini, saya yakin nanti di Banggar juga akan dibahas, saya yakin kita mewakili 10 Fraksi disini, 10 Fraksi ini mohon juga nanti kita satukan suara. Karena intinya ini bukan siapa yang merintah negeri ini, tapi siapa sekarang yang punya kewajiban mengelolah negeri ini kita semua.

Saya pikir ini dari saya Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua Menteri, Menteri Kehutanan dalam kondisinya panas yang sangat panjang hampir 8 bulan mampu masih meredakan asap yang katanya titik panasnya dimana-mana, tapi alhamdulillah asapnya tidak sehebat di 2000, jauh dibandingkan ditahun yang pernah kita alami itu. Dan saya yakin Bu Menteri mohon juga Ibu berani juga untuk minta ke Menteri Keuangan maupun Bappenas, bahwa selain apa yang sudah kita lakukan menunjukkan hasilnya, juga secara technology kita minta juga penyelamatan atau perlindungan alam kita denganb teknology, dulu pernah kita rencanakan beli pesawat atau helicopter, seandainya waktu itu kita anggarkan mungkin setiap Provinsi, 6 Provinsi yang menjadi masalah utamam dalam kebakaran, menjadi focus kita dalam kebakaran itu mungkin kita punya masing-

masing satu heli, heli ini mungkin tidak bisa memadamkan kebakaran, tapi dengan heli ini setidaknya kita punya langkah cepat reaksi cepat mengetahui dimana titik-titik terpanas, titik-titik inti sehingga dengan ini kita bisa mudah berkordinasi. Sumatera Selatan saya yakin yang jumlahnya sangat kecil, daerahnya lebih kecil dibandingkan dengan Kalimantan Tengah pun satu heli tidak cukup apa lagi Kalimantan Tengah. Makanya pendekatan konvensional, pendekatan kerakyatan, pendekatan rakyat permesta yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan ini satu terobosan bekerja sama dengan TNI, POLRI dan masyarakat lainnya, tapi ini juga saya yakin ini tidak cukup Bu Menteri, tolong nanti kita isi dengan kekuatan. Sewa pesawat salah satu solusi tapi apakah kita sadari nyewa pesawat ujungnya kita akan terhambat dengan harga yang luar biasa besarnya. Kita tidak bisa serta merta nyewa pesawat pada saat kondisi genting, maka itu yang paling bagus kita rencanakan kita punya alokasi sendiri.

Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditanggapi dari teman-teman anggota Komisi IV dan Pimpinan setelah nanti garis besar ditanggapi silakan kami diberikan jawaban tertulisnya baru nanti kita akan kesimpulan.

Saya pikir demikian ya teman-teman semua.

Kami persilahkan Pak Menteri Pertanian, mungkin Ibu Susi dulu, baru Pak Menteri terakhir, Pak Menteri Pertanian terakhir, Bu Susi, Ibu Situ, eh Kabulog dulu deh biar Kabulog biar beliau duluan kita kasih prioritas.

Kami persilahkan.

Enak jadi Ketua Komisi bisa ngatur seenak-enaknya.

DIREKTUR UTAMA Perum BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Baik terima kasih Pak,

Mohon izin kami ingin bisa menyampaikan beberapa hal tadi yang dipertanyakan Pak Agus, iya terima kasih Pak ini memang menjadi permasalahan kami khususnya di daerah Padang Pak Sumatera Barat karena memang disana beras solok Pak termasuk anak daro itu memang gabahnya sudah tinggi Pak, jadi tidak.

F-PPP (HASANUDDIN):

Pak Hasanuddin Pak.

DIREKTUR UTAMA Perum BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Oh mohon maaf Pak mohon maaf.

Pertanyaan dari Pak Hasanuddin.

Mohon izin Pak tadi yang dari Padang Pak itu memang gabah disana sudah tinggi Pak, tapi karena memang petaninya laku Pak maka kita tidak paksa juga untuk menyerap Pak, tapi kita juga mensuplay Pak untuk kebutuhan kekurangan dari produksi di Padang Pak, juga termasuk di Solok Pak ini yang kita suplay dari beberapa daerah yang khususnya beras ini yang testnya adalah pera Pak yang tadi Bapak sampaikan tadi Pak, ini Pak yang kita lakukan. Hanya memang kami beberapa dengan Menteri Pertanian untuk terus Pak Meningkatkan produksi beras disana Pak khususnya yang sesuai keinginan masyarakat disana Pak, karena memang beras khusus di Sumbat itu Pak memang punya ciri khas sendiri Pak, tidak bisa nanti beras dari Jawa itu bisa dimasukan kesana pasti tidak laku Pak. Nah ini sudah kami bekerja sama dengan Menteri Pertanian untuk membina gapotan-gapotan itu untuk menanam-menanam beras yang sesuai dengan desa disana Pak. Inshaallah Pak kita juga dengan Perguruan Tinggi Peruguruan Tinggi disana Pertanian Pak yang mereka terus meningkatkan bibit Pak khusus disana ini terus kita lakukan disana Pak. Inshaallah Pak kita tetap terus komit Pak untuk itu Pak.

Memang Pak ini menjadi permasalahan dikala Bulog ini ditugaskan untuk kita harus menyerap Pak sebanyak mungkin untuk hasil pertanian, karena kalau tidak Pak harga komoditi pertanian ini bisa anjlok Pak. Namun demikian menjadi permasalahan dikala tadi Pak Ketua sampaikan kita tidak punya kesempatan untuk menyalurkan Pak, karena tadi program-program Pemerintah tadi rasta itu sudah mulai hilang Pak diganti dengan BPNT, nah sekarang kita sudah disuruh bersaing Pak, tidak boleh juga hanya monopoli Bulog, seolah-olah gitu Pak, padahal tugas kita itukan program Pemerintah Pak, jadi seyogyannya kita yang harus menyalurkan Pak dan kualitas Bulog itu sudah dijamin Pak karena sudah kita jaga betul-betul Pak, tapi kan images yang dibangun selalu negative Pak bahwa Bulog itu berasya bau, suka berulat, macam-macam Pak, itukan memang tras Bulog itu semakin jatuh sehingga masyarakat uppriori terhadap Bulog.

Faktanya di lapangan Pak, mohon izin dengan BPNT kami sudah evaluasi dengan kerja sama dengan satgas pangan Pak. Masyarakat BPNT ini sebenarnya tidak paham ada beras medium dan premium, tapi dia menerimanya berasnya dikatakan premium karena harga Pak sehingga dia hanya mendapat 5 kilo saja, karena itu seolah-olah diberas premium dengan harga tinggi. Sehingga mereka dirugikan, yang harusnya mendapatkan jatah 10 kilo hanya 5 kilo, belum dengan permainan-permainan yang lain Pak. Nah berasnya kualitasnya rendah, kami sudah kumpulkan semua, kami sudah kerja sama dengan satgas pangan dari penyalur-penyulur yang lama, nah inikan memang permainan-permainan bisnis di lapangan yang dibebaskan demikian supaya mereka dapat keuntungan dari program untuk masyarakat miskin, inikan sangat keterlaluan menurut kami. Jadi ini kami sesuai dengan perintah Pak Presiden pada saat itu Pak, Pak Presiden menyatakan bahwa beras untuk BPNT itu harus dari Bulog, nah ini sudah disabut juga dengan Pak Wapres, dan Menteri Perekonomian, kami merupakan pada putusan itu Pak maka kami terus bertahan bahwa 100% beras itu harus disuplay dari Bulog, disuplay dari Bulog, dan kami siap Pak, karena kalau tidak

konsekuensinya yang kami serap sekarang ada dua setengah juta lebih untuk beras yang diberasal dari Petani itu bisa rusak Pak karena penyalurnya tidak ada, bahkan yang akan datang ini manakala kami tetap tidak berikan peluang Pak untuk penyaluran program-program Pemerintah bahkan ancamannya beras-beras yang kami serap ini akan rusak, jadi kembali seperti yang lalu.

Kami jamin Pak bahwa beras yang ada dikami sudah tidak ada lagi yang mutunya rendah, dan tadi Pak kami sudah menemukan salah satu technology Pak yang namanya kokon, ini juga kami menyimpan beras Pak itu dalam satu tahun Pak dengan technology ini tidak ada perubahan apa pun, semenjak kami masuk jadi Dirut Bulog kami menurunkan itu Pak kami coba karena itu baru bisa diukur setelah satu tahun Pak, jadi kami mencoba itu kami simpan Pak dibeberapa daerah dengan technology itu yang kemarin ini baru kami buka karena baru satu tahun Pak baru boleh dibuka beras itu secara fisik dan pengecekan laboratoriom tidak ada perubahan sama sekali Pak. Nah ini mungkin akan kami terapkan di daerah-daerah yang mungkin kita menyimpan beras terlalu lama Pak, karena yang lalu Pak kami ada beras yang akhirnya tidak bisa digunakan sama sekali, bahkan beras ini harus disposal total Pak. Namun karena ini belum ada keputusan dari Kementerian Keuangan karena anggaran belum ada Pak, anggaran untuk disposal itu, karena ini kan pertanggung jawabannya harus kepada negara Pak, uangnya kami pinjam bunganya komersial Pak dan kalau disposal tentunya semauanya kekeh dan kerugiannya itu harus diganti oleh negara Pak. Memang ini kesulitan kami Pak dari Bulog dikala kami ada penugasan dari Pemerintahan Negara, seperti kemarin kita membeli menyerap, itu uangnya dari pinjaman semua Pak, bunganya komersial. Jadi perlu kami laporkan juga Pak, hari ini kami setiap hari harus menyiapkan anggaran setiap hari itu kurang lebih 14 sampai 16 miliar. Itu juga dari bunga dan operasional, belum pinjaman kami yang luar biasa Pak. Jadi satu bulan kami kalau membayar bunga itu 240 sampai 250 miliar Pak, itu baru bunganya Pak. Nah ini yang sementara ini kalau Bulog tidak diberikan peluang untuk kami, untuk menyalurkan beras-beras ini maka Bulog akan kolep dan nanti akan hilang Pak, karena memang kita bisa dinyatakan rugi besar, nah ini nanti juga mohon dukungannya. Saya terima kasih juga Pak selama ini memang Komisi IV juga sangat mendukung kami, sehingga kami bisa eksis terus Pak. Sedangkan untuk komersial Pak kami memang sedang baru memulai komersial ini, dan jumlah kebersihan kami juga tidak besar Pak karena memang persaingan kami di lapangan juga masih sangat luar biasa Pak. Namun demikian kami juga membuat terobasan-terobosan, insyaallah Pak di komersial kami juga bisa eksis, ini karena perubahan dari yang tadinya PSO akhirnya Bulog sekarang harus bersaing juga dengan komersial, maka kita harus berubah juga Pak sebagian besar harus bisa ke komersial.

Mohon izin Pak tadi pertanyaan yang dari soal saudara-saudara kita di Papua Pak, insyaallah Pak kami sudah membicarakan ini dengan Pak Menteri Pertanian juga Pak, jadi CSAR kita nanti kita akan check Pak, berapa si kebutuhannya untuk mereka-mereka ini Pak, kita akan tindak lanjuti nanti kita juga akan kerja sama dengan Mensos,

dengan BUMN yang lain Pak karena dana BUMN ini ada dana-dana CSAR yang bisa kita dorong untuk itu Pak. Insyaallah Pak nanti kita komunikasikan Pak.

Kemudian apakah penyerapan ini Pak dengan tadi yang dari Sumbar juga soal HPP ini menguntungkan masih berpihak kepada petani apa tidak PAK, nah ini memang bermasalah Pak. Kalau kita mengikuti HPP kadang-kadang kita memang tidak bisa membeli Pak, menyerap. Kalau kita paksaan petani yang dirugikan oleh kita Pak. Nah kita memang lepas Pak, lepas pada pasar bebas Pak. Namun memang kalau itu harganya memadai itu kita serap sebanyak-banyaknya sesuai dengan programnya demikian, jangan sampai jatuh Pak. Dikala kemarin kami juga kordinasi dengan Kementerian Pertanian dikala ada beras yang jatuh Pak kemarin harganya kami yang menyerap dengan HPP itu Pak, kami menyerap sebanyak-banyaknya. Nah ini juga sudah kita lakukan Pak, sehingga yang diprogramkan negara itu CBP hanya 1 sampai 1,5 juta, kami sekarang sudah 2,5 lebih Pak ini CBP-nya yang kita serap. Nah ini memang komitmen kami supaya petani ada kepastian bahwa hasil petaninya ini laku terjual Pak, kalau tidak mereka bahkan akan bermasalah Pak, supaya tadi kenapa kok petani ini banyak terlibat dengan tengkulak Pak, karena memang Pak mohon izin kedepan system yang harus kita bangun, termasuk anggaran kurt itu yang harus langsung bisa turun ke petani-petani. Hari ini memang petani sulit Pak karena memang, tadi yang disampaikan bahwa kadang-kadang petani sudah harus mendapatkan uang sesegera dan mudah, pembiayaan ini tapi dari perbankan ini tidak cepat menyambut itu, sehingga mereka disambut oleh tengkulak, pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa malah terlilit dengan hutang.

Saya kira ini Pak, jadi kami mohon dukungannya dari Bapak Komisi IV bahwa seyogyanya program-program Pemerintah termasuk penyaluran rastra dan BPN yang nanti kedepan Pak BPNT ini akan berubah menjadi kartu sembako Pak. Nah kartu sembako ini karena kita evaluasi di lapangan Pak Presiden juga melihat di lapangan Pak faktanya masyarakat kita penerimaan manfaat ini tidak hanya membutuhkan beras Pak, tadi dia membutuhkan telur yang sekarang sudah diatur telur. Tapi mereka membutuhkan minyak goreng dan gula. Maka dengan 4 kategori tadi Pak jenis kebutuhan masyarakat maka nanti akan ada paket sembako, yang ini nantinya Pak kita berharap bahwa paket ini sudah bisa dipenuhi oleh Bulog dan kami sudah menyiapkan untuk kesiappan kita menghadapi paket sembako yang akan datang karena BPNT akan menjadi paket sembako. Dan prediksi kami Pak tahun ini sampai September, sampai dengan Desember ini untuk program BPNT kita akan mengeluarkan beras 700 ribu tonkalau itu diserahkan oleh Bulog. Namun di lapangan sampai dengan saat ini memang perlu kami sampaikan dari pihak-pihak ketiga dan beberapa dari itu juga masih belum ikhlas untuk diserahkan ke Bulog, jadi kita masih terus berusaha dan bertempur istilahnya Pak, karena program ini rupanya sudah menjadi hal yang nyaman bagi sebagian oknum Pak, karena ini sudah di zona nyaman mereka dengan program BPNT ini sudah mendapatkan satu keuntungan Pak, jadi ini satu hal yang harus kita

hilangkan karena bagaimana pun ini program untuk masyarakat miskin bukan untuk dibisniskan.

Saya kira ini Pak yang bisa saya sampaikan, terima kasih.
Kami kembalikan kepada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saudara Direktur Bulog, nanti kita selesaikan dulu baru nanti Bapak tambahkan.

Silakan.

F-PPP (HASANUDDIN):

Sedikit Pak Ketua,

Gali lobang tutup lobang, Bulog bisa engga Pak diputihkan saja oleh negara supaya Bapak bekerja baru. Kalau sekarangkan Bapak tutup lobang gali lobang, tutup lobang gali lobang. Berapa hutangnya tadi Pak?

DIRUT BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Kalau bunga dari hutang itu kurang lebih setiap bulan 250 sampai 252 miliar, bunganya saja Pak.

KETUA RAPAT:

Dipahami Pak.

Silakan Ibu Susi.

MENTERI KKP (Dr. SUSI PUDJIASTUTI):

Terima kasih Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi IV.

Menanggapi beberapa saya pikir untuk yang detail nanti akan saya tulis tapi highlight, untuk bantuan kapal saya memang sebetulnya lebih senang bantuan kapal kecil Pak dari pada kapal besar karena banyak nelayan juga tidak mampu untuk melakukan operasional.

Yang kedua dengan tendensi ikan yang begitu banyak, sekarang ini contohnya di Tuna, orang yang beruntung ini justru kapal-kapal kecil bukan kapal-kapal besar. Yang dapat uang banyak itu adalah nelayan-nelayan kapal kecil. Contohnya di Maluku juga sama, jadi Pak Watimena saya tidak mengerti kalau Pemerintahnya minta kapal 500 gt, sementara rakyatnya sekarang itu luar biasa kaya karena dia mancing dengan kapal dua meter saja dapet tuna 60-70 kilo itu 15 juta pera dapet duit Pak, sementara kapal-kapal besar tidak dapat apa-apa. Jadi ini yang saya pikir Bapak harus menjelaskan kembali, karena saya pikir ini mungkin bisikan yang salah dan sebetulnya yang persoalan kapal besar sudah selesai itu sudah tidak boleh dibuka lagi, karena itu sebetulnya ada deal yang sama-sama yang penting illegal fishing itu selesai, jadi kita tidak buka nama, buka apa, tapi urusan selesai. Dan dengan Thailand dengan apa, saya juga sudah bicara dengan Menteri-nya dan gitu Pak jangan diungkit-ungkit lagi. Kapal ikan asing, esk asing, modal asing, tidak boleh menangkap ikan di Indonesia, menangkap ikan itu urusan orang Indonesia, dan itu perpresnya sudah jelas ditahun 2016 tidak boleh diganggu gugat, kalau iya itu sampai dibuka lagi iya seluruh Indonesia berbreakan kali.

Tentang yang 1600 kapal disana tidak pakai orang sana, iya itu tadi saya bilang 13 pelabuhan tidak diberdayakan, mestinya mereka harus bongkar disana Pak, bongkar disana kita juga nanti senang karena repotnya jadi benar Pak, laporannya. Sampai hari ini dengan semua restriction dan apa maksudnya kalau kamu tidak benar laporannya saya tidak akan perpanjang. Izin itu laporannya juga masih banyak yang antrepterdnnya Pak, maksimum sekarang ini pelaporannya hanya 40% maksimum. Jadi pendapat 2000 ton, laporann pengusaha paling 400-600, rata-rata masih begitu kepatuhannya masih, tapi sudah lebih baik. PNBK kita dari 300 miliar juga sekarang sudah hampir 1 T. Pajak juga sebelum saya di KKP cuman 300 miliar sekarang 1,5. Dengan perubahan pelaporan saya perkirakan dengan Dirjen Pajak nanti mungkin bisa sampai 5, bisa sampai 10 triliun Pak pajak sampai perikanan. Jadi luar biasa. Jadi kalau saya melihat seperti ini mau dirubah-rubah lagi ya sayang, dan sebetulnya sekarang ini yang untung adalah nelayan kecil Pak, nelayan yang kecil-kecil ini dapat ikan yang mahal-mahal. Jadi kalau 500 gt jalan lagi dengan jarring 50km/75km, jarring 2 kapal begitu hara huru habis.

Dan saya ini ngotot untuk pembukaan slint di Tua, di Ambon kenapa harus di darat dilakukan, jadi ekspotnya tidak boleh langsung di kapal, supaya memperkerjakan orang Maluku, orang setempat. Kalo tremper saya perbolehkan masuk, sama lagi menjadi kaya dulu lagi ekspot di tengah laut Pak, engga ada lagi uang masuk. Tapi sampai hari ini gayung tidak disambut, engga ada yang mau bekerja Pak Michael. Itu pelabuhan 13 dengan Undang-Undang Otonomi kan lepas dari Kabupaten, tapi sama Provinsi, Provinsinya juga engga tau Pak punya pelabuhan 13. Iya terus bagaimanakan. Nah ini bukan cuman di Maluku, diseluruh Indonesia Pak, di Natuna saya suruh Bupati bikin Perda, haruskan itu kapal-kapal dari Jawa daratkan disini, kamu

lelang, mereka beli lagi bawa pulang boleh, tapi paling tidak Pemda dapat 1% misalnya, 1600 kapal 1 kapal itu 10 miliar paling sedikit pertahun. Bayangkan 1600x10 miliar, itu kalau 1% itu sudah 1,6 T, tutup mata itu Pak. Iya tapi harus mau diurus itu TPI-TPInya karena itu bukan milik kami, kami hanya punya pelabuhan itu Ambon sama di Tua. Da itu sudah rencana, dulu Pelindo mau bikin sama saya tidak boleh, kamu pelabuhan umumnya sana iya angkutnya pakai darat supaya nelayan lending masih memperkerjakan orang setempat untuk angkatin lagi, mereka komplek, karena itu menjadi tidak efisien. Iya ketidak efisienan itu kan membocorkan uang kerakyat disana untuk kerja, yang saya minta seperti itu Pak. Jadi sampai hari ini tremper masih saya larang ke Indonesia Pak engga boleh beroperasi di Indonesia. Transitment di tengah laut tidak boleh, iya supaya apa, supaya ikannya kedarat. Kalau pengangkutan dari wilayah tanggap boleh, itu namanya kapal penyangga kapal angkut, tapi kalau tremper tidak boleh masuk Indonesia, kalau tremper masuk ke Indonesia, iyaudah ribuan ton di tengah laut.

Kira-kira seperti itu Pak, jadi saya setuju untuk semua itu di daerah supaya daerahnya dapat sesuatu, tapi kalau engga mau kerja ya susah Pak, kalau nelayan dari Jawa senengnya bawa pulang pemilik-pemilik kapal itu, tapi ya harus dicatat dulu mesinnya dimana. Sama Natuna juga, Riau juga seperti itu, Kota Baru itu juga banyak kapal dari Jawa, harusnya Bupati segera bikin TPI haruskan masuk, itu juga akan memperbaiki incomenya ABK dan nakoda Pak, karena ada proses lelang, kalau proses lelang harganya tidak jatuh. Berarti prosentase bagi hasil ABK nakoda juga akan lebih baik, nah cuman saya tidak bisa kerja sendiri, itu Pemda karena asernya Pemda-Pemda, baik Pemprov maupun Kabupaten hampir tidak punya asset lagi dengan Undang-Undang Otonomi itu Pak. Jadi kira-kira seperti itu.

Dan untuk hal-hal lain yang masih belum sempurna, iya saya mohon dengan sangat diteruskan konsultasinya dan saya persilakan Eselon I. Kan Pak Michael tadi bilang, takut Eselon I begini, terus saya tidak setuju. Untuk saya kalau namanya bantuan masyarakat Pak tidak ada tidak setuju, dan tidak boleh rapat di hotel, seminar, bikin judul-judul seminar panjang 3-4 baris, baca judulnya saja juga udah pusing Bapak, apa lagi ngerti isinya, presentasinya berlembar-lembar, itukan liat slidennya saja sudah pusing Pak, mengertinya susah lagi, itu tidak boleh. Tapi kalau mau kasih perahu, kasih jarring, kasih KJA, kasih apa saja ke masyarakat, saya targetnya dari dulu 80% untuk bantuan masyarakat. Itu saja Pak. Yang seminar-seminar saya memang tidak suka, itu biasanya saya coret-coret Pak, itu saja yang saya coret. Yang lain-lain saya tidak pernah merubah-merubah. Asset untuk masyarakat, untuk bantuan masyarakat saya setuju saja saya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Susi.

Yang terakhir saya pikir indah sekali, tahun 2017 teman-teman ini semua komplek, mudah-mudahan nanti teknis Bu ya ini mungkin urusan teknis Bu ya. Yang jelas kami sudah dengan secara, inikan direkam, Ibu sudah mengatakan siap, berarti nanti tidak ada alasan Eselon I engga siap untuk melaksanakan, ini saja yang penting supaya teman-teman anggota juga tidak curiga sama Pimpinan, terutama Pak Sudin.

Pak Sudin baru, siswa Lemhanas ada disini.

Kami persilahkan Ibu Siti.

KEMENTERIAN LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA., M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan,
Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.**

Saya mohon izin untuk merespon 4 hal Pak Ketua, terutama terkait dengan BLU (Badan Layanan Umum) ini memang badan layanan yang ada di Kementerian LHK dan dia merupakan proses setelah lahirnya Undang-Undang 2003, kemudian PP 6 2007. Kemudian BLU dibentuk tahun 2010 dan dia pada dasarnya adalah penyertaan dari dana rebuasasi yang diletakan di Kementerian LHK. Yang sudah diletakan 2 triliun dan pada sudah selesai dan sudah bertransaksi kira-kira 1,5 triliun. Ini terkait juga dengan dana dalam proses roadmaps kemiskinan itu Bapak, karena dana BLU yang untuk hutan social misalnya kita lihat di Padang tikar, Padang Tikar itu hutan social yang ada di Kalimantan Barat, rakyatnya urus mangrove, kepiting dan lain-lain itu sudah 12 miliar dan grose marginenya tumbuh baik. BLU ini adalah dana bergulir jadi tidak, iya.

Kemudian contoh lain dari dana BLU ini di Pemalang misalnya, sudah diberikan 2 - 3 miliar, jadi modelnya kredit dan dana bergulir harus sudah dikembalikan, jadi pola ini memang sudah ada. Nah berdasarkan PP 46 tahun 2017 tentang instrument ekonomi lingkungan maka nanti akan dibentuk BPD LH, jadi pendanaan lingkungan hidup yang untuk small gren, jadi bisa untuk masyarakat, kelompok tani kecil, bisa juga untuk investasi dan bahkan untuk kapasitas billing, baik untuk masyarakat maupun untuk aparat. Ini adalah prosesnya yang berjalan.

Bapak Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota.

Terkait dengan DAK saya mohon izin dan mohon periksa halaman 22 -27, kalau kita lihat prosesnya yang sudah berjalan maka sebetulnya persoalan kriteria itu sudah diselesaikan pada bulan Juli Ketua, dan sekarang prosesnya sudah di DPR RI di Badan Anggaran sehingga tanda kutip pertarungannya sudah di DPR Ketua. Jadi sudah ada finalisasi penilaiannya dan sekarang sedang dalam penghitungan alokasi finalnya di Badang Anggaran, jadi dana LHK-nya sudah selesai bersama trilateral meeting dengan Bappenas, Keuangan dan dalam hal ini sudah ada catatan dari Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian terkait dengan bagaimana road maps Kementerian LHK terhadap kemiskinan, kalau kita lihat dari suatu program hutan social saja tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus Hermanto, melalui kebijakan alokasi dan akses kawasan hutan yang diberikan pada masyarakat. Jadi kalau urut-urutannya kira-kira dari kita tetapkan luas kawasan untuk perizin hutan social yaitu, hutan desa, hutan kemasyarakatan, HTR (hutan tanaman rakyat), perlakuan perlindungan bersama masyarakat bersama LMDH-nya di pulau Jawa dan yang lain-lain. Kemudian dari situ sudah dialokasikan 3,32 juta hektar bagi 5939 kelompok, dengan tadi jumlah KK-nya 700 ribu lebih dan dari situ kemudian dari 5939 kelompok ini dia akan membentuk atau berproses menjadi kelompok usaha perhutanan social, jadi memang ada prosesnya sehingga dia nanti harus menjadi kelompok usaha yang produktif yang bisa dikembangkan, kemudian bisa menjadi ekonomi domestic. Ini yang sudah keluar contohnya itu yang di Padang Tikar, Lumajang, di Pematang itu memang polanya kurang lebih seperti itu. Kemudian di dalam proses ini juga ada penyelesaian yang hutan ada, misalnya sudah diselesaikan sudah dimapping dan 578 ribu hektar yang sudah siap diverifikasi tinggal menunggu dari Perda, dan juga sambil berjalan ternyata ada mitigasi konflik nerialnya, jadi kelihatan sebetulnya Pak cuman mungkin saya kira nanti kita formulasikan saja dalam sebuah dokumen. Ketika dia menjadi atau mengarah pada pusat ekonomi domestic dan kelompoknya menjadi produktif disitu juga ada mitra pendamping bekerja, jadi sebetulnya prosesnya cukup berjalan.

Pak Ketua saya juga mohon izin melaporkan di dalam road maps makro ini juga sebetulnya yang mikro-mikro juga misalnya, kalau selama ini HTI kita tau kurang berkembang kurang baik maka misalnya dengan ada BLU itu HTR-nya sebagai HTI ini itu bisa dikembangkan, jadi ini sambil terus berproses. Disisi lain misalnya ketika masih ada masalah pemukiman di dalam kawasan hutan ini juga sambil berjalan diselesaikan. Jadi sebetulnya nanti Menteri yang akan datang tinggal nerusin saja saya kira. Iya polanya sudah ada dan format-format sistemnya juga sudah kelihatan.

Terakhir saya mau mengatakan bahwa design-design itu untuk beberapa program itu sudah ada dan kita sudah setting, sehingga nanti menelusurinya itu mudah.

Kemudian soal hotspot, Pimpinan terima kasih. Kami mohon izin melaporkan. Memang fluktuasi hotspotnya tinggi. Kalau pada tanggal 6 hari Kamis, kira-kira hotspot itu 6890an, maka pada hari ini tadi saya monitor sampai setengah 12 itu angkanya 2967. Jadi memang turun naik – turun naik. Riau 360, Jambi 568, Kalimantan Barat 537 dan sebagainya. Padahal kemarin misalnya di Kalimantan Barat 803, di Riau kemarin baru 84. Nah apa yang penting disini Ketua, bahwa kalau kita lihat perbandingan dengan tahun 2015 pada bulan Agustus 8000 hotspotnya, di 2019 3800, serta dibulan September Hotspot tahun 2015 25.512, sekarang masih karena baru tanggal 9 masih 3512. Jadi yang penting adalah bagaimana ini dikelola dan dikontrol. Pada saat ini sudah ada 46 pesawat BNPB, TNI dan KLHK yaitu 18 di Riau 11 Sumsel, 7 di Kalbar, 7 di Kalteng, dan 3 di Jambi. Jadi awan juga sudah mulai naik, sudah ada 70%an awan sehingga hujan buatan bisa jalan. Memang sampai tanggal kemarin ada hujan buatan di Riau dan di Sumsel, tapi tadi kami kordinasi terus dengan BMKG bahwa ini bisa lebih intensif lagi. Water bombing sudah terus dilakukan dan sampai dengan sekarang sudah dibuang air untuk water bombing 239 juta liter, dibandingkan dengan tahun lalu Ketua sampai dengan 350 juta liter. Jadi usaha kita ini masih terus kita lakukan dan kita masih berusaha mengontrolnya dengan baik.

Saya kira itu yang ingin kami laporkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Satu mungkin yang perlu diklarifikasi ya untuk kami pertanyakan, anggaran BRG itu kan pertama kali, inikan tentang BRG, karena kebetulankan menempel di KLHK, dulu anggaran BRG itu sampai hampir 1 triliun, sekarang anggaran BRG turun-turun-turun sampai sekarang tinggal 3 berapa miliar, nah ini saya mau, karenakan konsepnya kurang lebih sama saling memback up, saling melengkapi, bagaimana ini anggaran bisa, masih bisa ditambah tidak Bu di BRG. Karena saya yakin kalau dulu 1 triliun memang sempat dikembalikan setengahnya, setidaknya-tidaknya tidak 300 ya, mungkin di 500 triliun salah satu yang masih wajar.

Mungkin gimana bisa dikomentari?

KEMENTERIAN LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA., M.Sc.):

Pertama Ketua mohon izin kami melaporkan.

Ketika badan restorasi gambut ini dibentuk oleh Bapak Presiden dan kami melakukan designnya, arahan dari Bapak Presiden dan wakil Presiden kuncinya adalah bahwa BRG ini bisa katakanlah link dengan pendanaan internasional. Jadi sebetulnya tidak dimaksudkan untuk pakai APBN banyak-banyak, sebetulnya. Tapi karena waktu itu kita baru mulai dan pemetaan tentang hidrologis gambut dan lain-lain juga belum, maka dia diplot 800 miliar Ketua. Tapi kemudian di dalam prosesnya dia melihat seperti tidak terserap sehingga dikembalikan. Nah kalau sekarang ini yang diplot ini sudah sesuai dengan pemetaan gambut yang ditargetkannya sebetulnya, jadi kita masih terus stand kepada target-target itu.

Demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Ibu.

Bapak Ibu sekalian,

Dari Menteri Kehutanan saya pikir kita langsung ke Menteri Pertanian, penutup, baru nanti kita kesimpulan. Pak Menteri Pertanian mungkin agak lama.

Kami persilahkan.

F-PDIP (SUDIN, SE):

Ketua izin dulu Ketua, saya tidak menanggapi masalah-masalah yang sudah dibahas tadi, karena memang saya tidak ikut, saya bosan izin.

Saya ingin menanyakan kepada Dirjen Dakum dan Pesisir.

Perihal kapal sedot pasir yang bekerja beraktivitas di Gunung Krakatau, saya hanya ingin tau, kalau dari berita-berita nampaknya sudah mulai agak berubah karena ingin amat sangat membahayakan sekali. Periode yang lalu yang Menterinya itu saudara saya sama-sama dari Lampung dan sekarang juga saudara saya dari Lampung, itu juga pernah 2010 pernah juga, eh 2015 pernah juga seperti itu, sekarang terulang lagi. Nah saya minta tanggapannya proses ini sampai dimana dan sanksinya itu bagaimana, karena itu sangat-sangat merusak alam, tetapi Bu Susi nampaknya stadementnya engga ada saya lihat di media, mengenai kapal pasir besar, kapal besar mengedot pasir di dekat Gunung Krakatau yang di Lampung.

Gitu aja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari KKP mau, dari Gagum dulu mau dikomentari?
Oh silahkan Bu.

KEMENTERIAN LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA., M.Sc.):

Ketua,

Kalau dari LHK melihat sedot pasir di Kratau ini sebetulnya tahun 2014 ke 2015 di Bulan Desember mereka nakal juga dan KLHK turun Pak Ketua, kita engga ada toleransi soal itu. Memang saya sudah tanya Pak Dirjen waktu beritanya naik itu ada juga upaya-upaya dari Kementerian KKP, jadi ini akan sinergis. Pak Dirjen kita sudah ngirimin team ya, jadi sudah berapa hari, 3-4 hari, karena saya sudah tanya pada minggu lalu. Jadi saya sudah diturunkan teamnya sekarang saya kira ini kita tidak ada toleransi Bapak.

Terima kasih.

DIRJEN RPL KKP (BRAMANTIO):

Terima kasih Bapak sudah menyampaikan.

Jadi memang team kami sudah turun, dilokasi tersebut adalah zona perikanan tangkap Bapak. Izinnya kalau pun itu dikeluarkan izin masuk ke 0-12 mil yaitu Provinsi, kita tidak ada toleransi juga Bapak.

Terima kasih.

F-PDIP (SUDIN, SE):

Jadi izinnya itu 2010 sudah mati, dan nelayan tanya saya, abang apa yang harus kami lakukan, berikan bensin yang banyak bakar. Itu saja statement saya, karena itu akan merusak alam. Karena mereka cuman memikirkan otaknya uang-uang-uang, dan tidka pernah memikirkan alamnya bagaimana.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Tumben agak bener Bapak ini, tambah pinter jadi sekolah. Abis sekolah lamhanas, baru lulusan lamhanas ini.

Ibu Susi mungkin Ibu bisa stritmen juga ini, sama halnya juga dengan illegal fishing, ini illegal maining yang dibawa-bawa, tenggelamkan saja Bu.

MENTERI KKP (Dr. SUSI PUDJIASTUTI):

Setuju Pak,

Saya biasanya kalau ada nelayan laporan ada banyak kapal troll diapain Bu, bakar Pak. Saya tulis di SMS, di WA saya tulis bakar. Kalau ditangkep Polisi, kasih lihat Polisinya, disuruh Menteri Bakar. Jadi saya setuju Pak Sudin Bakar saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silahkan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (ANDI AMRAN SULAIMAN, MP):

Terima kasiih Pak Ketua dan Komisi IV yang saya Banggakan.

Kami berpikir tadi paling setengah jam atau satu jam, karena kita sudah 4 tahun bersama, ternyata tetap gaspul. Jadi kami semangatnya Komisi IV luar biasa, kami apresiasi, tepuk tangan untuk teman-teman kita Komisi IV. Khusus kami hanya jawab hanya dua Pak, yang lain tertulis yang lain karena kelihatan sudah lelah teman-teman kita, khususnya Komisi IV. Pak Hermanto minta tolong kita sudah langganan, kayanya 5 tahun kita langganan ini tinggal 4 minggu.

Pak jujur waktu Pak Sudin masuk jantung saya berdebar begini, ini baru-baru pendidikan beliau.

Pak Hermato kami sudah membuat gren design untuk Pertanian bukan 5 tahun tapi sampai 2045, dan ada bukunya, nanti kami kirim khusus ke Bapak, ada bukunya khusus pangan strategis, kita bisa tunjukan, nah ini Pak, jadi ini ada bukunya Pak Hermanto, ada peta jalan, pertanian sampai 2045 dan ada bukunya. Semua para pakar

kami libatkan pada saat itu, alhamdulillah hasilnya mengembirakan sesuai target, bahkan kemudian ada tadi tiga penanya masalah efisien anggaran, efisien efektif, kita tunjukkan anggaran kita coba langsung. Kami langsung saja Pak Hermanto anggaran kita 32 triliun turun menjadi 21 triliun jadi bukan naik, tetapi PDB kita naik dari 800 menjadi 1000 triliun dan ini kata BPS, ini ditanda tangan. Target kita pertumbuhan untuk sector Pertanian itu 3,5%, tapi kita capai 3,7 Pak Hermanto, jadi sangat efisien. Tanda tangannya BPS di depan supaya Pak Hermanto tidak meragukan ini data. Kedepan, stop ini PDB kita 800 menjadi 1000 diatas target untuk tingkat dunia. PDB Pertanian berada pada posisi nomor 5 dari 224 Negara saat ini, tapi anggarannya turun. Kemudian ini kedepan Pak dilegalisir oleh BPS dan BPKPM, karena kami tidak ingin berpolimik bahwa data ini Pertanian yang buat, jadi jangan sampai nanti, oh jangan-jangan ini, bukan kami yang membuat ini Pak Hermanto, ini BPS.

Kemudian next inflasi, inflasinya bahan makanan ini 10%, pada saat kita bertemu sama Pak Hermanto, alhamdulillah 2017 1,26% ini tidak mudah, ini kerja keras kita semua termasuk Komisi I terima kasih Pak Ketua, Wakil Ketua dan teman-teman sekalian ini hasil kita bersama.

Saya kira itu saja yang kami sampaikan, ada tadi dari Pak Ketua satu. Irigasi insyaallah kita tambah. Tolong Pak Dirjen karena kami tinggal 4 minggu lagi, tolong janji itu, oh enam minggu. Tolong yang belum selesai diselesaikan, karena nanti ditagih di akhirat nanti Pak Hermanto, itu yang saya paling takut, kami takut ditagih nanti. Insyaallah Pak Ketua kami mohon maaf banyak yang belum sempurna, banyak yang belum tercapai, insyaallah aku yakin pada Pemerintahan berikutnya jauh lebih baik dari pada hari ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Pak Ketua komentar sedikit saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Engga boleh.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Sudah selesai.
Silahkan – silahkan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Amran sebagai Menteri yang bekerja luar biasa dengan hasil yang luar biasa. Ditengah anggaran yang menurut tapi, produktivitasnya naik. Saya berharap beliau nanti menjadi Menteri lagi.

KETUA RAPAT:

Aamiin.
Pak Danil silahkan.
Engga Pak beliau memang cara mengapresiasinya begitu.
Sama halnya kita Komisi IV ini ngomongnya itu lama Pak, tapi keputusannya pasti mendukung.

Silahkan Pak Hasanuddin.

F-PPP (Dr. H. HASANUDDIN, M.M., M.Si.):

Baik Pak Ketua.

Ini ada rancangan Undang – Undang Sistim Budidaya Pertanian Berkelanjutan, mungkinkah kita bisa undangkan sebelum kita berakhir?

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Kan kita besok konsinering, Bapak sudah dapat undangan belum?
Nah berarti Bapak engga di Panja kan?

Oh di Panja iya, besok Pak ada Pak.

Karantina Pak Menteri, Bapak masih ditunggu hari Rabu di Karantinan sini siap Pak yak karena Bapak, menunggu Bapak. Ini tertunda karena Bapak waktu itu sempat sakit, Bapak. Kita harapkan Bapak, ada tiga Menteri yang lain kita engga peduli yang penting ada Bapak.

Iya tiga Menteri, ada Bu, kapan lagi Bu.

Ibu bilang, hitungan saya engga enam minggu ya, karenakan pelantikan kita tanggal 1, Presiden tanggal 20, habis itu harus memilih Menteri – Menteri sebulan, nah sudah enam minggu tambah sebulan itu Bu kalau engga salah. Ibu dilantik, jadi masih lama, Bapak TMT Ibu, engga ada dimisioner. Terserah. Kita kan pokoknya nunggunya disini aja.

Baik Bapak Ibu sekalian.

Pak Sudin mau mengusir saya dari DPR, saya ditinggal, biar saya pergi dari DPR gitu, haduh, terima kasih Pak Sudin do'anya saya ingatkan itu.

Bapak Ibu sekalian demikian penjelasan dari Pemerintah, selanjutnya kita akan kesimpulan. Kita mulai kesimpulan dari Pertanian dulu, karena yang paling banyak.

Kesimpulan pertama untuk Kementerian Pertanian.

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan alokasi RAPBN Kementerian Pertanian tahun 2020 sebesar Rp.21.55.309.526.000 (dua puluh satu triliun lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan nomor S557.1/MK.02/2019, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala BAPPENAS nomor B432/M.PPN/D.8/KU.0101/07557.1MK.02/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang bersumber dari;
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp.20.781.579.145.000 (dua puluh triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Rupiah Pendamping sebesar Rp.5.150.000.000 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.171.862.781.000 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - d. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp.96.717.600.000 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). Dengan komposisi program per-ESELON I sebagai berikut.

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp.1.861.679.046.000 (satu triliun delapan ratus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh enam ribu rupiah).
- Irjen sebesar Rp.90.328.596.000 (sembilan puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Dirjen Tanaman Pangan sebesar Rp.5.962.808.824.000 (lima triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Dirjen Hortikultura sebesar Rp.1.082.601.627.000 (satu triliun delapan puluh dua miliar enam ratus satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Dirjen Perkebunan sebesar Rp.1.525.816.437.000 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.2.022.297.255.000 (dua triliun dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.3.403.898.216.000 (tiga triliun empat ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp.1.790.970.429.000 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp.1.625.617.131.000 (satu triliun enam ratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp.663.563.546.000 (enam ratus enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Dan Bapan Karantina Pertanian sebesar Rp.1.025.728.419.000 (satu triliun dua puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama ESELON I sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Inilah Kesimpulan Nomor 1, apakah bisa disetujui dari angka – angkanya, Pak Menteri sudah benar belum, Pak Menteri setuju?

MENTERI PERTANIAN (ANDI AMRAN SULAIMAN, MP):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak Ibu sekalian kita ambil kesimpulan setuju?

(KETOK/KESIMPULAN DISETUJUI)

Kesimpulan nomor dua untuk Kementerian Pertanian.

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan dana alokasi khusus (BAK) Bidang Pertanian tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.500.000.000 (satu triliun lima ratus miliar) yang terdiri dari DAK Provinsi sebesar Rp.338.000.000.000, dan DAK Kabupaten Kota sebesar Rp.1.116.000.000.000 (satu triliun seratus enam belas miliar rupiah). Selanjutnya komisi 4 DPR RI bersama Eselon 1 akan melakukan pendalaman untuk membahas kriteria teknis diangkat dan alokasi per daerah berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN (ANDI AMRAN SULAIMAN, MP):

Apa masih dibutuhkan itu Pak Sekjen?

KETUA RAPAT:

Ganti saja untuk kriteria teknisnya ya?

MENTERI PERTANIAN (ANDI AMRAN SULAIMAN, MP):

Dihapus saja Pak.

KETUA RAPAT:

Yang melakukan pendalaman saja, alokasi per-Daerah pendalaman untuk membahas alokasi per-Daerah.

Kriteria teknisnya dihilangkan. Kan sudah ditentukan Banggar kriteria teknisnya sama Bappenas.

Membahas DAK dan alokasi per daerah.

Baik Pak Menteri, teman – teman setuju?

Setuju engga nih, setuju?

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Iya kita bahas aja kita lihat, jangan sampai nanti salah juga.

Kesimpulan nomor tiga.

3. Komisi 4 DPR RI mendapat penjelasan atas usulan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2020 sebanyak Rp.7.949.303 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga) ton atau setara dengan Rp.26.627.384.695.943 (dua puluh enam triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut.
 - Urea sebanyak Rp.3.274.303 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga) ton atau setara dengan Rp.11.348.344.555.943 (sebelas triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - SP36 sebanyak Rp.500.000 ton atau setara dengan Rp.1.658.239.500.000
 - ZA sebanyak Rp.750.000 ton atau setara dengan Rp.1.349.000.169.000.
 - NPK sebanyak Rp.2.705.000 ton atau setara dengan Rp.11.128.911.000.000.
 - Dan pupuk organik sebanyak Rp.720.000 ton atau setara dengan 1.142.720.640.000.

Sudah ini angkanya dari Pupuk Indonesia sudah benar?

Sudah memang yang menentukan Menteri Pertanian, tinggal menerima disana ya.

Iya silahkan.

MENTERI PERTANIAN (ANDI AMRAN SULAIMAN, MP):

Iya Pak setuju.

Izin Pak Ketua, karena kondisi tingkat kesuburan lahan sawah sudah sangat berkurang perlu pupuk hayati atau pupuk organik sebagaimana saya sampaikan tadi, maka yang itu harus dirubah, minimal 5 triliun.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang mana?

Terima kasih Pak, Bapak usulannya nanti tinggal disampaikan ke Banggar biar Banggar dianggap, ya kita nggak bisa ngerubah disini.

MENTERI PERTANIAN (ANDI AMRAN SULAIMAN, MP):

Loby dulu Banggarnya, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Sementara ini setuju dengan angka ini?

Pak Menterin setuju?

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Kesimpulan Nomor empat.

4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp.9.818.329.939.271. Antara lain;
 - Tahun 2015 sebesar Rp.5.45.000.329.128.458,
 - Tahun 2016 sebesar Rp.2.939.751.206.345,
 - Dan Tahun 2017 sebesar Rp.1.833.249.604.468.

Angkanya dari dari pupuk Indonesia sudah benar belum ini, kurang bayar?
9 triliun,
Kok bisa ada 9 triliun di sini.

2018 belum masuk, karena Bapak menghitungnya dari kewajiban Bapak, piutang Bapak yang Bapak tagih. Kalau Pemerintah ngitungnya kesini dari membayar sesuai dengan audit BPK. Jadi sementara yang kita gunakan menggunakan audit BPK.

Kalau dari angka Bapak berapa 15 triliun?

Ini ada sistem penghitungan keuangan yang kita agak terlambat beberapa bulan karena konsepnya ngitung harus nunggu audit BPK.

Kita pakai dulu yang audit BPK ya Pak ya.

Baik Bapak Ibu sekalian.

Pak Menteri ini setuju?

Teman-teman kita ambil persetujuan nomor empat?

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Demikian dari Kementerian Pertanian.

Selanjutnya kita kepada kesimpulan Kementerian LHK.

Kesimpulan pertama untuk Kementerian LHK.

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan lokasi RAPBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 sebesar Rp.9.319.325.816.000. Berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan nomor S557.1/MK.02/2019 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas nomor .B432/M.PPN/D.8/KU.01.01/07557.1/MK.02/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang bersumber dari;
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp.4.000.898.15.510.000.
 - b. Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp.18.88.804.000.
 - c. Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.000.000.000.000.
 - d. Hibah Luar Negeri sebesar Rp.295.996.537.000.
 - e. Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp.237.411.500.000.
 - f. Dan Badan Layanan Umum sebesar Rp.68.350.000.000 dengan komposisi program per-ESELON I sebagai berikut;
 - SEKJEN (Sekretariat Jenderal) sebesar Rp.592.759.666.000,
 - Irjen sebesar Rp.86.966.609.000.
 - Dirjen Pengelohan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp.301.754.834.000.
 - Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp.2.799.916.214.000.
 - Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp.2.49.226.000.996.000.

- Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp.480.427.464.000.
- Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi sebesar Rp.339.833.245.000.
- Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.341.386.089.000.
- Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp.458.679.200.000.
- Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.468.790.771.000.
- Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp.313.272.831.000.
- Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp.361.844.139.000.
- Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp.357.472.233.000.
- Dan Badan Restorasi Gambut sebesar Rp.312.995.525.000.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama ESELON I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari angkanya sudah setuju Bu?

Setuju Bu Menteri?

Teman-teman kita ambil persetujuan?

Pak Sudin?

Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan dana alokasi khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.612.200.000.000 yang terdiri dari DAK sub bidang Lingkungan Hidup sebesar 312 miliar, alokasi di 12 Provinsi dan 139 Kabupaten Kota dan BAK sub bidang Kehutanan sebesar Rp.300.200.000.000 alokasi di 33 Provinsi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman untuk membahas alokasi per daerah.

Ibu Menteri setuju?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kalau engga salah tadi yang di Pertanian melakukan pendalamannya bersama ESELON I deh Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya pedalaman bersama ESELON I.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri setuju?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kita ambil keputusan.

Pak Sudin setuju?

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Ini bacanya ya satu, sudah selesai dari KLHK?

Selanjutnya kita menuju ke kesimpulan Menteri KKP.

Harus dibaca satu persatu, leleh.

Suratnya samakan ini ya dengan yang tadi ya?

Iya tapi harus dibacalah, direkam masalahnya ini.

Gimana, dasarnya apa kalau gitu kan.

Baik kesimpulan dari Kementerian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelah pertama.

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan alokasi RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sebesar Rp. 6.472.753.539.000, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan nomor S557.1/MK02/2019 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BAPPENAS nomor B432/M.PPN/D.8/KU.0101/07557/1/MK.02/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang bersumber dari;

- a. Rupiah Murni sebesar Rp.6.278.285.636.000.
- b. Badan Layanan Umum sebesar Rp.58.234.286.000.
- c. Dan PNPB sebesar Rp.136.233.617.000.

Dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut.

- o Sekretariat Jenderal sebesar Rp.515.623.761.000.
- o Inspektorat Jenderal sebesar Rp.85.267.955.000.
- o Dirjen Perikanan Tangkap sebesar Rp.726.554.240.000.
- o Dirjen Perikanan Budidaya sebesar Rp.739.572.614.000.
- o Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan sebesar Rp.366.017.696.000.
- o Dirjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp.507.850.023.000.
- o Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan sebesar Rp.1.062.575.107.000.
- o Badan Riset & Sumber Daya Manusia Kelautan & Perikanan sebesar Rp.1.868.216.557.000.
- o Dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp.601.075.586.000.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama ESELON I sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undang.

Bu Menteri angkanya sudah benar?

MENTERI KKP (Dr. SUSI PUDJIASTUTI):

Sudah Pak.

KETUA RAPAT:

Dan setuju?

MENTERI KKP (Dr. SUSI PUDJIASTUTI):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Teman-teman kita ambil persetujuan?

Pak Sulaiman setuju?

Pak Fadholi?

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Kesimpulan Nomor 2.

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan dana alokasi khusus BAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.005.200.000.000. Yang terdiri dari DAK Provinsi sebesar Rp.327.803.383.300, dan DAK Kabupaten Kota sebesar Rp.677.396.616.700.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalam bersama ESELON I untuk membahas alokasi per-daerah.

Ibu Menteri setuju, direkam Bu?
Teman-teman kita ambil persetujuan?

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Demikian 2 (dua) Kesimpulan untuk Kementerian KKP.
Kesimpulan yang selanjutnya untuk Bulog.
Satu Kesimpulan saja sementara ini.

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas alokasi anggaran Perum Bulog pada RAPBN tahun 2020 sebesar Rp.12.628.155.138.290 yang akan dialokasikan untuk Komiditi beras sebesar Rp.5.873.400.000.000, dan Komoditi selain beras sebesar Rp.6.754.755.138.290.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Pak Ketua, saya prinsipnya setuju dan mendukung karena saya ingin kongkrit saja Komoditas itu apa?

Karena kalau kita tidak,

KETUA RAPAT:

Ada di halaman 16 (enam belas).

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Saya pikir di Kesimpulan berlanjut.

KETUA RAPAT:

Ada berapa Komoditas Pak?

DIREKTUR UTAMA Perum BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Ada jagung, kedelai, ini Pak sudah kami bacakan tadi Pak.

KETUA RAPAT:

Pajale ini?

DIREKTUR UTAMA Perum BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Ini yang 11 (sebelas) Komoditas atau yang 3 (tiga)?

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, MP.):

Kalau disebutkan ini tidak fleksibel dia, karena in tanaman semusim, ini kita prediksi katakanlah jagung tiba-tiba cabai yang butuh.

KETUA RAPAT:

Ada jenis tanaman lain?

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Oke jadi begini Pak Menteri,

Walaupun Pak Menteri menyebutkan itu di dalam keputusan anggaran dia tidak masuk kedalam katagori lain-lain, karena lain-lain itu satu hal yang abstrak, tidak bisa diukur. Jadi memang kita harus kongkrit disini.

KETUA RAPAT:

Tapi enggakpapa Pak masuk sajakin saja, nanti kalau ada perubahan kita bikin penyesuaian enggak ada masalah.

Ikut Pak, angkanya jagung, kedelai, gula, daging, minyak goreng masuk Pak?

Direktur Utama Perum BULOG (Komjen. Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso):

Yang kami ajukan ini hanya jagung, kedelai, gula dan daging nilainya 6 triliun ini.

KETUA RAPAT:

Iya baik Pak.

Jagung, kedelai, gula dan daging.

Nanti, iya kita bisa kok. Komisi IV kan selalu fleksibel.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Enggak maksud saya Komiditi.

KETUA RAPAT:

Enggak Pak udah-udah.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Maksud saya Komiditi boleh fleksibel, tapi kita harus kongkrit.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak, sudah Pak.

Jadi kita tambahkan selain beras itu adalah jagung, kedelai, gula dan daging.

Pak Dirut setuju?

DIREKTUR UTAMA Perum BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Ok.
Pak Hermanto setuju?

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Sip.

KETUA RAPAT:

Pak Umar Arsal setuju?
Besok kita acara Fermon.

(KETOK/DAPAT DISETUJUI)

Bapak Ibu sekalian.

Demikian Rapat Kerja hari ini, dua jam setengah dari jadwal yang kita tentukan. Tapi itu bukan karena kita mempersulit, karena kita semua pingin mendengar Bapak Ibu sekalian setelah berapa lama kita jarang ketemu, karena ketemu Pak Menteri dan Ibu Menteri ini kalau boleh dibilang 5 tahun itu paling ketemunya 12 kali resmi. Jadi, iya anggap sajalah ini semacam temu kangen.

Demikian dari kami,
Sebelum kami akhiri kami persilakan.

F-PPP (Dr. H. HASANUDDIN, M.M., M.Si.):

Pak,
Pada Pak Menteri, Ibu Menteri sekalian kami yang tidak lagi duduk DPR RI mohonb maaf kalau selama kita bersuwah ada hal-hal yang kurang berkenan tidak ada gading yang tak retak, iya retak inilah yang disebut gading. Kalau ada sumur diladang, bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang, insyaallah 2024 kita berjumpa lagi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Sebelum di, belum selesai ini rapat, Ketua rapatnya masih saya belum diganti. Sabar, astagfirullah, ini terlalu jauh.

Maksud saya, kita beri kesempatan untuk Pak Menteri atau masin-masing Menteri untuk menyampaikan kata penutup. Kan periode ini tetap bagaimanapun juga akan berakhir, kita dilantik lagi tanggal 1, baru ada formasi baru.

Tetap kita beri kesempatan masing-masing, atau mewakili saja, Ibu-Ibu?
Masing-masing dong, masing-masing.
Ibu Susi, silahkan Ibu Susi.

MENTERI KKP (Dr. SUSI PUDJIASTUTI):

Bapak Ketua, Wakil Ketua, seluruh Anggota Komis IV, Ibu Siti Nurbaya, Pak Amran, dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini.

Saya ucapkan terima kasih atas seluruh support dukungan selama ini, selama saya menjadi Menteri di Kementerian Kelautan & Perikanan officially yang saya tau nanti bulan depan saya selesai, saya juga mohon maaf kalau banyak kesalahan yang saya buat, terutama keras kepalaan saya yang barang kali kadang-kadang susah di. Iya tapi untuk kebaikan Indonesia Pak, untuk obsesi saya bahwa kita bisa membetulkan sesuatu, Indonesia adalah negara besar dan saya pikir apa yang sudah terjadi dengan segala handicap kanan-kiri, sana-sini tapi saya pikir kita bisa membuktikan Indonesia adalah negara maritime besar terutama di bidang Perikanan sekarang ini sudah luar biasa, neraca perdagangan nomor 1 di Asia Tenggara, Tuna kita juga nomor 1 16% dari Tuna yang dimakan di dunia datang dari Laut kita, dan banyak lain Pak. Walaupun saya dikenalnya cuman tukang nembakin kapal katanya, tapi iyakan saya menjalankan amanah bukan untuk pribadi. Jadi dengan segala kerendahan hati kalau ada kesalahan saya mohon maaf, saya tidak pernah berpengalaman jadi Menteri Pak sebelumnya, pasti banyak yang tidak pantas dan tidak sepatutnya. Saya mencoba dengan segala intuisi saya untuk menjaga images sebagai Pejabat Negeri, Pejabat Tinggi Negara semampu saya, iya tapi banyak hal saya juga tidak bisa, saya hanya orang biasa. Iya sekali lagi terima kasih, semoga Indonesia akan lebih baik atas kerja sama dari Parlemen dan Eksekutif.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Buwas.

DIREKTUR UTAMA Perum BULOG (KOMJEL. POL. (PURN.) Drs. BUDI WASESO):

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Pada kesempatan hari ini juga kami mengucapkan terima kasih Pak, karena selama ini kami juga bisa bekerja dengan baik karena dorongan dan dukungan dari Bapak Ibu Komisi IV sekalian. Dan selanjutnya kami mohon dukungan dan terus masukan saran untuk kami terus bisa berbuat, karena bagaimanapun BULOG harus berpihak kepada masyarakat. Insyaallah dengan kami telah berkomitmen kalau bisa pangan ini tidak ada import, kalau memang tidak perlu import maka mudah-mudahan ini bisa terealisasi Pak, karena memang selama 2 tahun ini kita khususnya beras sudah tidak import Pak.

Demikian Pak lebih kurangnya kami mohon maaf.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., MBA.):

Kumsalam.

Pak Mentan, baru Bu Siti Nurbaya.

MENTERI PERTANIAN (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, MP.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pak Ketua Komisi IV yang saya hormati, saya banggakan,
Pak Wakil Komisi IV yang saya hormati, saya banggakan,
Seluruh Anggota Komisi IV yang kami sangat-sangat cintai,
Bapak Ibu sekalian.**

Capaian Kementerian Pertanian kami sudah tunjukan tadi selama 4 tahun, tahun ke 5, ini 5 tahun itulah capaian kita bersama. Capaian itu adalah berkat support dari Komisi IV, kami hanya petugasnya Bapak. Jadi kami selalu katakana ini berkat kerja keras kita semua, tapi kalau ada kesalahan atau program yang belum tercapai moga-moga kedepan bisa dicapai, dan kalau ada yang saya di Kementerian Pertanian kami yang bertanggung jawab, tapi kalau ada capaian yang baik itu adalah capaian kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Terima kasih.

Silahkan Bu Menteri.

KEMENTERIAN LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA., M.Sc.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama saya ingin mencapaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan, catatan, dan cared terhadap RKA K/L 2020 ini. Dan berikut kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kesempatan untuk berbagi pengetahuan, kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan tugas-tugas konsitusional, kami memimpin seluruh jajaran Kementerian LHK dengan para yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan subjek yang relative berat dan mungkin sangat berat malahan Ketua, dan **Bapak Ibu yang saya hormati**. Tantangan selain wilayah, kawasan, juga tantangan kelembagaan, tentangan yurisdiksi, mungkin catatan-catatan LSM dan lainnya, kalau seluruh sector mungkin LHK yang paling banyak catatannya.

Saya berterima kasih bahwa Komisi IV DPR RI selalu menjadi rumah kami, selalu menjadi tempat bagi saya untuk saya berkonsultasi dan mendapatkan padangan dan arahan yang sebaik-baiknya dalam artikulasi politik menangani Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Sangat tidak mudah saya berterima kasih atas segala dukungan dan izinkan saya menyampaikan kebanggaan saya pada Komisi IV DPR RI sebagai Komisi Parlemen yang tangguh mecare dan berbobot. Saya terus terang selalu merasa dilindungi oleh Komisi IV ini.

Minta Maaf Bapak, Ibu Anggota yang kami hormati dan Pimpinan yang kami hormati.

Minta Maaf untuk hal-hal yang belum bisa saya selesaikan selama memimpin seluruh jajaran ESELON I KLHK. Terima kasih kepada seleruh jajaran Sekretarian Jenderal, Komisi IV DPR RI yang selalu kami ganggu, juga kawan-kawan ESELON I dari Kementan dan KKP.

Terima kasih Ketua sekali lagi, terima kasih Bapak, Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI **yang kami hormati.**

Sekian.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (EDHY PRABOWO, M.M., MBA.):

Wa'alaikumsalam

Kami mewakili teman-teman di Komisi IV dan teman-teman Anggota Komisi IV lainnya, mungkin ada dari Pimpinan yang mau menyampaika, Pak Roem mungkin, kami persilahkan Pak Roem dari tadi mau ngomong tapi saya tahan-tahan terus, saya terpaksa harus kasih.

ANGGOTA (PAK ROEM):

Iya sebetulnya saya tidak mau ngomong, cuman terharu saya tidak ketemu Ibu Susi lagi.

Jadi pertama-tama saya atas nama Pimpinan dan rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Pak Menteri, Pak Amran, Ibu Susi, dan juga Ibudan kita yang tercinta dari Kehutanan. Mengapa saya ucapkan selamat berarti, sudah lepas dari pada tugas-tugas yang berat yang dihadapi selama ini. Saya bisa membayangkan

kalau Presiden itu tidurnya hanya 4 jam, berarti Menteri-nya hanya tidur 3 jam, standby selama Presiden tidak tidur, dan kerjanya sangat berat, dan fakta yang prestasi yang sangat luar biasa, faktanya Presiden kita incomeback menang. Peranan dari Pertanian, KKP, dan Kehutanan sangat luar biasa, dan juga peranan dari Komisi IV juga pasti berperan untuk itu.

Karena itu saya ucapkan selamat dan semoga nanti saya yakin Presiden masih tetap akan mempertahankan 3 Menteri ini. Kami juga yakin disini prestasi yang sangat luar biasa ini harus mendapat apresiasi dari semua kita. Dan juga kepada kami Pak Viva, ada Pak Michael, saya sendiri juga mohon diri juga kepada kawan-kawan sekalian mungkin tidak bisa hadir di ruangan ini untuk mulai tanggal 1 Oktober. Tetapi perjuangan belum selesai, kita bisa bersama-sama untuk bangsa dan negara.

Demikian dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak, Ibu sekalian.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Ketua saya mau ngongon.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, SE., M.M.):

Melalui forum ini saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa pada kerja kita bersama ya, jadi Parlemen dan kerja Eksekutif. Tentunya setiap kita, setiap Anggota, dan juga Kementerian punya kontribusi besar terhadap pembangunan sector Pertanian, sector Kehutanan, sector Kelautan dan juga sector beras yang selama ini kita kelolah dengan baik.

Oleh karena itu kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa atas essly eksklusifnya, incomed ada yang banyak terbantu juga melalui program-program yang sudah dibuat kita bersama. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa juga kepada Bapak Menteri dan Pak Bulog juga, kesempatan barangkali ini adalah, kepada Pak Sudin juga saya sampaikan terima kasih. Jadi begitu sajalah Pak, nanti Pak Sudin terima kasih jugalah.

Kami do'akan semoga Bapak Ibu seluruh amal solehnya diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian nanti semoga juga sukses telah ini bisa juga nanti Menteri kita do'akan juga.

Demikian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Bapak Ibu sekalian,

Pernyataan saya sudah diwakili oleh Pak Hermanto, karena saya pikir kalau saya ngomong lagi akan banyak, karena besok kita masih ada pertemuan lagi, 2 minggu yang akan datang kita masih ada Raker Pengesahana Anggaran. Jadi disitu ada kesempatan lagi, ini tadi baru latihan saja ngomong, jadi baru latihan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.

Wewakili Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mohon maaf apabila dari kami ada hal-hal yang kurang berkenan.

Billahi Taufiq Walhidayah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Sore

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Omsanti-santi-santiom

Kita foto bersama Pak

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:45)

Jakarta, 09 September 2019

**An. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001**